

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN ROTE NDAO  
TAHUN ANGGARAN 2022**



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN ROTE NDAO  
TAHUN 2022**

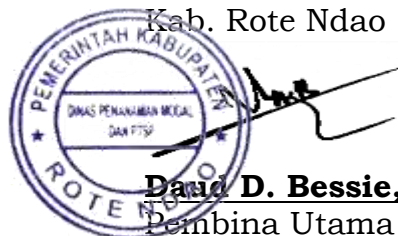
## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2022 ini dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja dan implementasi *good governance* terhadap publik dan *stakeholders*. Penyusunan laporan ini mengutamakan prinsip transparansi dan akuntabilitas sehingga pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran capaian kinerja secara terperinci yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao pada Tahun Anggaran 2022. Laporan Kinerja ini juga sebagai instrumen umpan balik untuk melakukan perbaikan dan perencanaan tahun depan terutama sebagai input bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima kepada masyarakat.

Akhirnya kami berharap LKIP ini dapat memberikan kontribusi sebagai media informasi dan bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Ba'a, 19 Januari 2023  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kab. Rote Ndao



**David D. Bessie, S.Pd**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196908111998011002

## IKTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2022 sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja terhadap apa yang menjadi komitmen yang tertuang dalam RENSTRA dan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022. LKIP ini memuat tentang capaian kinerja sasaran dengan indikator-indikator yang jelas dan terukur guna menjelaskan keberhasilan dan kegagalan serta hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada tahun anggaran 2022.

Pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao pada Tahun Anggaran 2022 terdiri dari 3 (tiga) sasaran dengan 5 (lima) Indikator Kinerja yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	6 = (5/4)x100	7
Meningkatnya transparansi dan responsibilitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Pelayanan Publik	Poin	80	90,21	112,76	Sangat Tinggi
		Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 1				112,76
Meningkatnya Investasi	Meningkatnya investasi berskala nasional	PMDN/PMA	70	74	105,71	Sangat Tinggi
	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rupiah	165.000.000.000	788.394.339.000	477,81	Sangat Tinggi
	Realisasi investasi PMDN/PMA	Rupiah	100.000.000.000	64.423.980.161	64,42	Rendah
	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 2				215,98	Sangat Tinggi
Meningkatnya Pelayanan Perizinan	Persentase Bangunan/Usaha Berijin	%	70	104	148,57	Sangat Tinggi
	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 3				148,57	Sangat Tinggi
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA					181,86	Sangat Tinggi

Rata-rata capaian indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao pada Tahun Anggaran 2022 sebesar **181,86%** atau dikategorikan “**Sangat Tinggi**”, dengan rata-rata capaian yaitu:

- 1) Capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Transparansi dan responsibilitas Pelayanan Publik** sebesar 112,76% (*Sangat Tinggi*);
- 2) Capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Investasi Berskala Nasional** sebesar 215,98% (*Sangat Tinggi*); dan
- 3) Capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Pelayanan Perizinan** sebesar 148,57% (*Sangat Tinggi*)

Keberhasilan atas pencapaian kinerja tahun 2022 sangat dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Adanya pengalihan pengurusan perijinan dari *offline* ke *online* (melalui system Online Single Submission Risk Based Area / OSS-RBA) sehingga banyak pelaku usaha dan masyarakat dimudahkan melalui pelayanan tersebut.
- 2) Efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya-upaya perbaikan dan inovasi dari segala aspek secara terus menerus dalam rangka peningkatan pelayanan perizinan kepada masyarakat secara optimal
- 3) Dukungan Dana Alokasi Khusus Non Fisik dari Pemerintah Pusat (BKMPM RI) untuk Fasilitasi Penanaman Modal
- 4) Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam mengemban Misi ke-4 Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Periode Tahun 2019-2024 yaitu “**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima**” melalui upaya-upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dibidang pelayanan perizinan.

- 5) Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Online Sistem Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal sehingga adanya peningkatan pemahaman para pelaku usaha mengenai system pelaporan LKPM berbasis NIB
- 6) Melakukan Pemantauan dan Pengawasan dalam melaksanakan kewajiban LKPM
- 7) Koordinasi terkait Perizinan dan Penanaman Modal ke DPMPTSP Propinsi NTT

Meskipun terdapat faktor-faktor pendukung keberhasilan diatas, dalam pencapaian kinerja tahun 2022 masih menghadapi hambatan dan kendala antara lain:

- 1) Belum optimalnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dibidang Perizinan dan Penanaman Modal;
- 2) Masih terbatasnya Sumberdaya Manusia Aparatur; dan
- 3) Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang berbasis teknologi informasi.

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao pada tahun mendatang maka akan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dibidang Perizinan dan Penanaman Modal;
- 2) Peningkatan kualitas Sumberdaya Aparatur; dan
- 3) Optimalisasi dan penyediaan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi.

Dalam pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 2.675.661.629,-** (Dua Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Enam Ratus Dua Puluh Sembilan *Rupiah*) dan terealisasi sebesar **Rp.2.624.304.162,-** ( Dua

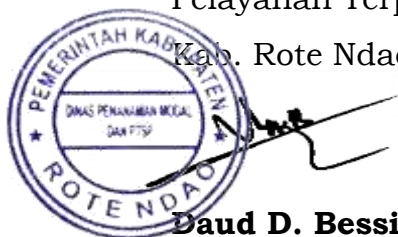
Milyar Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Empat Ribu Seratus Enam Puluh Dua Ribu) atau sebesar **98,08%**. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat efisiensi anggaran belanja dalam pencapaian indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 sebesar Rp.51.357.467,- (*Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah*) dengan tingkat efisiensi sebesar 1,92% atau dikategorikan **Efisien**. Selain itu, dengan rasio rata-rata capaian indikator kinerja (181,86%) terhadap realisasi anggaran (98,08%) menunjukkan tingkat efektifitas dalam pencapaian indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 sebesar 1,85 atau berada pada nilai rasio >1 sehingga dikategorikan **Efektif**.

Pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao senantiasa diupayakan untuk ditingkatkan terus menerus pada tahun-tahun yang akan datang serta diupayakan agar setiap aspirasi masyarakat dan kepentingannya dapat terus terakomodasikan dalam APBD Kabupaten Rote Ndao setiap tahun, dimana APBD itu adalah merupakan kristalisasi dari prioritas-prioritas dan pencapaian-pencapaian yang harus diwujudkan setiap tahunnya.

Ba'a, 19 Januari 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kab. Rote Ndao



**Daud D. Bessie, S.Pd**

Pembina Utama Muda

NIP. 196908111998011002

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul .....</b>	<b>i</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>ii</b>
<b>Iktisar Eksekutif .....</b>	<b>iii</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>vii</b>
<b>Daftar Tabel .....</b>	<b>viii</b>
<b>Daftar Gambar .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	2
C. Gambaran Umum .....	3
D. Dasar Hukum .....	13
E. Sistematika Pelaporan .....	13
<b>BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA .....</b>	<b>16</b>
A. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019-2024 .....	16
B. Indikator Kinerja Utama .....	22
C. Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022 .....	23
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>24</b>
A. Kerangka Pengukuran Kinerja.....	24
B. Capaian Kinerja .....	27
C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .....	29
D. Kinerja Keuangan .....	54
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN .....</b>	<b>62</b>
1. LEMBAR VERIVIKASI LEVEL 1	
2. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2022	
3. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022	
4. POHON KINERJA TAHUN 2022	
5. RENCANA AKSI TAHUN 2022	
6. INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN 2019-2024	
7. SOP PENYUSUNAN LKIP	
8. SK TIM PEMYUSUN LKIP	



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Keadaan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pangkat/ Golongan dan Jenis Kelamin .....	5
Tabel 1.2.	Keadaan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin .....	5
Tabel 1.3.	Daftar Susunan Pegawai Negeri Sipil .....	6
Tabel 1.4.	Keadaan Peralatan Kantor dan Aset Lainnya .....	8
Tabel 2.1.	Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) .....	22
Tabel 2.2.	Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022 .....	23
Tabel 3.1.	Pengukuran Skala Ordinal Capaian Kinerja .....	26
Tabel 3.2.	Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Rote Ndao Tahun Anggaran 2022.....	27
Tabel 3.3.	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Tranparansi dan Responsibilitas Pelayanan Publik .....	28
Tabel 3.4.	Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Tranparansi dan Responsibilitas Pelayanan Publik.....	29
Tabel 3.6.	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Investasi.....	31
Tabel 3.7.	Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Investasi .....	35
Tabel 3.8.	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Pelayanan Perizinan.....	50
Tabel 3.9.	Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Perijinan .....	54
Tabel 3.10.	Realisasi keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2022 .....	55
Tabel 3.11.	Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2021 .	59



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Susunan Perangkat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao .....	4
Gambar 3.1. Tingkat Capaian Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2022 .....	28
Gambar 3.2. Tren Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Publik Tahun 2016-2022 .....	32
Gambar 3.3. Tren Meningkatnya Jumlah Investasi berskala Nasional 2016-2021 .....	39
Gambar 3.4. Tren Jumlah Nilai Investasi berskala Nasional (PMDN/PMA) Tahun 2016-2021 .....	45
Gambar 3.5. Tren Realisasi Investasi (PMDN/PMA) Tahun 2020-2021 .....	47
Gambar 3.6. Tren Persentase Bangunan/Usaha Berijin .....	52

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat guna mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk dapat mewujudkan penyelenggara negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab yang dilaksanakan secara efektif, efisien, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam kerangka pembangunan *good governance*, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Orientasi pada input, terutama uang seperti yang selama ini dijalankan, hendaknya sudah harus bergeser dari pola pikir berapa besar dana yang telah dan akan dihabiskan menjadi berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada kesejahteraan masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *Output* merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedang *outcome* adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberi manfaat bagi masyarakat. Untuk itu, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao berkewajiban mempertanggungjawabkan kepada pihak yang memberikan amanah. Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini akan menjelaskan tentang capaian dan informasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan secara mendetail sebagai masukan yang sangat bermanfaat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Rote Ndao pada masa mendatang.

## **B. Maksud dan Tujuan**

### **1. Maksud**

Adapun Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2022 adalah:

- a. Untuk menggambarkan sejauh mana capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao Kabupaten Rote Ndao selama Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan kinerja yang telah diperjanjikan.
- b. Sebagai bahan evaluasi bagi pimpinan Perangkat Daerah dan pimpinan instansi yang lebih tinggi tentang keberhasilan yang dicapai serta upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi;
- c. Merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

### **2. Tujuan**

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2022 meliputi 3 (tiga) aspek utama sebagai berikut:

- a. **Aspek Akuntabilitas Kinerja** yaitu sebagai sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh dan dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2022.
- b. **Aspek Manajemen Kinerja** yaitu sebagai media untuk mendapat umpan balik terhadap setiap keberhasilan dan atau kegagalan kinerja yang ditemukan, sehingga kedepan dapat dirumuskan strategi dan pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.
- c. **Aspek penerapan SAKIP** yaitu untuk mendorong menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara benar sehingga terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

### C. Gambaran Umum

Tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao sesuai Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 63 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagai berikut :

#### 1. Tugas Pokok.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun dan melaksanakan urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

#### 2. Fungsi

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Rote Ndao fungsi :

- a. Perumusan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

#### 3. Struktur Organisasi

- a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao merupakan unsur Staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao terdiri dari Kepala Dinas yang didukung oleh : 1 (satu) Sekretaris membawahi 1 (satu) Kepala Sub Bagian yang berfungsi sebagai *supporting staf*, yaitu :
  1. Kasubag. umum dan Kepegawaian, dan Kelompok Jabatan Fungsional (2 orang), 1 Orang Koordinator Substansi Penanaman Modal membawahi Kelompok

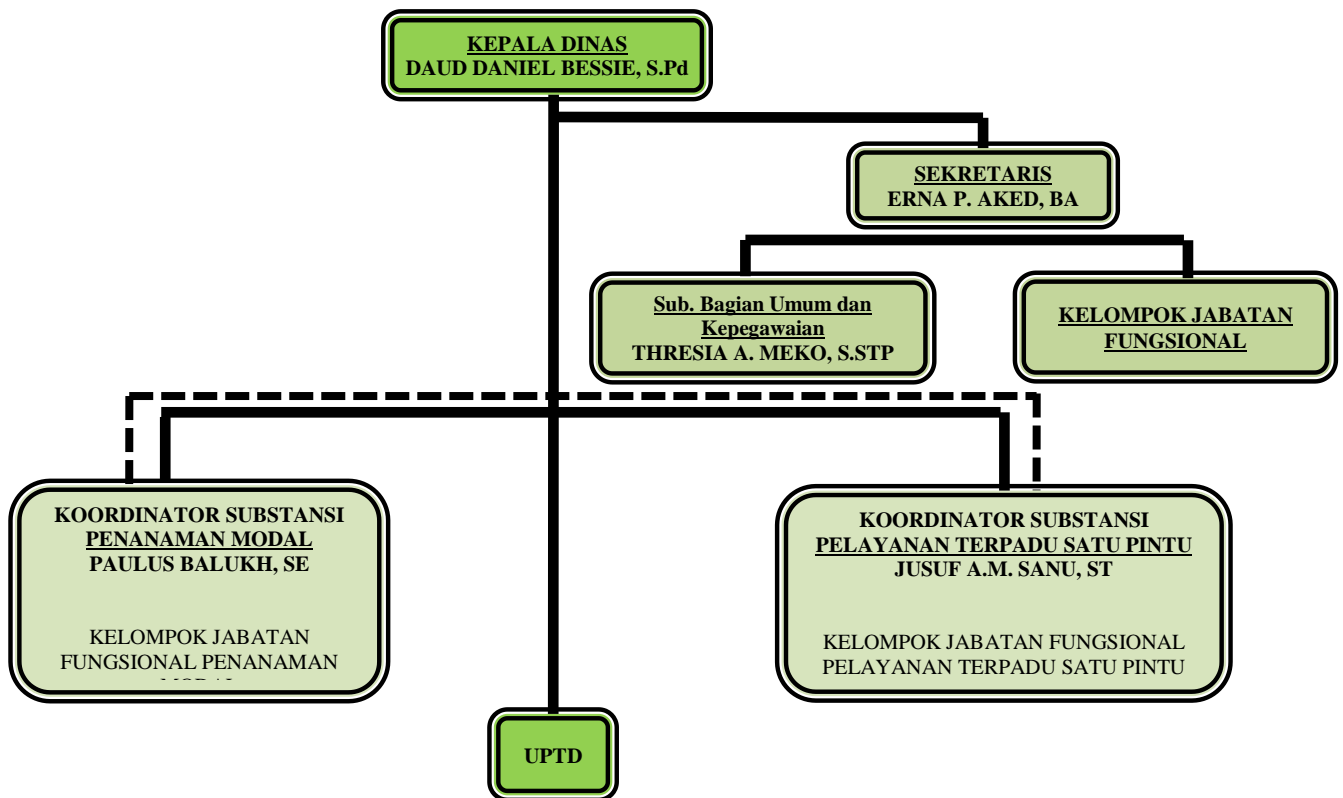
Jabatan Fungsional Penanaman Modal, 1 Orang Koordinator Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu membawahi kelompok jabatan fungsional pelayanan terpadu satu pintu.

a. Susunan Organisasi.

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao terdiri dari :

1. Kepala Dinas (Terisi)
2. Sekretaris (terisi); membawahi 1 Kasubag. (terisi), 2 kelompok fungsional (terisi)
3. 1 Orang Koordinator Substansi Penanaman Modal (terisi) membawahi Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal. (terisi);

**Gambar 1.1.**  
**Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao**



Keterangan :

- : Garis Komando  
 - - - - - : Garis Koordinasi

#### 4. Sumber Daya Manusia

Adapun jumlah kekuatan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Rote Ndao saat ini berjumlah 21 (dua puluh delapan) orang yang terdiri dari 10 (Sepuluh) orang laki-laki dan 11 (sebelas) orang perempuan, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 1.1.**  
**Keadaan Pegawai Negeri Sipil**  
**Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Jenis Kelamin**

No	Golongan Ruang	Pangkat	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
1	IV/c	Pembina Utama Muda	1	0	1
2	IV/b	Pembina Tk.1		1	1
3	IV/a	Pembina	3	1	4
<i>Jumlah Golongan IV</i>			<i>4</i>	<i>2</i>	<i>6</i>
2	III/d	Penata Tk.I	3	6	9
3	III/c	Penata	-	1	1
4	III/b	Penata Muda Tk.I	-	1	1
4	III/a	Penata Muda	2	-	2
<i>Jumlah Golongan III</i>			<i>5</i>	<i>8</i>	<i>13</i>
5	II/d	Pengatur Tk.I	1	1	2
<i>Jumlah Golongan II</i>			<i>1</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
<b>TOTAL</b>			<b>10</b>	<b>11</b>	<b>21</b>

*Keterangan : Keadaan 31 Desember 2022.*

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Kabupaten Rote Ndao sebanyak 21 (dua puluh satu) orang terdiri dari golongan IV sebanyak 6 (enam) orang, golongan III sebanyak 13 (tiga belas) orang dan golongan II sebanyak 2 (dua) orang.

Keadaan pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.2.**  
**Keadaan Pegawai Negeri Sipil**  
**Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin**

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	S2	-	-	-
2	S1	8	9	17
3	D3	-	1	1
3	SLTA/SMK	2	1	3
<b>Total</b>		<b>10</b>	<b>11</b>	<b>21</b>

*Keterangan : Keadaan 30 Desember 2022.*

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao sebanyak 21 (dua puluh satu) orang terdiri dari pendidikan S1 berjumlah 17 (Tujuh Belas) orang, D3 berjumlah 1 (satu) orang dan SMA berjumlah 3 (tiga) orang.

Susunan kepegawaian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

**Tabel 1.3.**  
**Daftar Susunan Pegawai Negeri Sipil**

No	Nama	Jabatan / Golongan Ruang
1	Daud D. Bessie, S.Pd NIP. 196908111998011002	Kepala Dinas IV/c
2	Erna P. Aked, BA NIP. 196711051989032011	Sekretaris IV/b
3	Paulus Balukh, SE NIP. 196412121968031031	Analisis Kebijakan Ahli Madya IV/a
4	Justus Sakan, SH NIP. 196408151989031024	Analisis Kebijakan Ahli Madya IV/a
5	Jusuf A. M. Sanu, ST NIP. 197508092005011008	Analisis Kebijakan Ahli Madya IV/a
6	Senisulita Lami, SE NIP. 197109042007012021	Analisis Kebijakan Ahli Madya IV/a
7	Husain Mitan, S.Sos NIP. 1978010220010011017	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah III/d
8	Yulensi A. Amalo, SH NIP. 197308031992032002	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah III/d
9	Thresia A. Meko, S.STP NIP. 198701182006022001	Kasubag. Umum & Kepegawaian III/d
10	Carolina P. Fanggidae, SE NIP. 197101072006042015	Analisis Kebijakan Ahli Muda III/d
11	Yeli E. Foeh, SE NIP. 197707242007012010	Analisis Kebijakan Ahli Muda III/d
12	Petronela Giri, SE NIP. 197202292007012012	Analisis Kebijakan Ahli Muda III/d



13	Sarina Saudale, SE NIP. 197903082009042003	Perencana Ahli Muda III/d
14	Gustan Bessie, SE NIP. 1978081820010011016	Analisis Kebijakan Ahli Muda III/d
15	Sony Anin, SE NIP. 1982123120010011056	Analisis Kebijakan Ahli Muda III/d
16	Sherly Ndun, SE NIP. 19791116 2012122002	Analisis Kebijakan Ahli Muda III/c
17	Yulia Mansula, SH NIP. 198507142005012004	Analisis Kebijakan Ahli Muda III/b
18	Dedy Ph. E Manafe, SE NIP. 196703052007011035	Pelaksana III/a
19	Miswar Simin NIP. 198703192006041005	Pelaksana III/a
20	Jeri Fajarudin NIP. 198201162007011004	Pelaksana II/d
21	Merni S. Adoe NIP. 198205152007012011	Pelaksana II/d

*Keterangan : Keadaan 30 Desember 2021.*

Disamping tenaga Pegawai Negeri Sipil, pelaksanaan operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao didukung oleh Tenaga Kontrak Daerah sebanyak 6 (enam) orang yaitu Sopir 1 (satu) orang, Tenaga administrasi sebanyak 1 (satu) orang, Penjaga malam 1 (satu) orang, Tenaga Operator aplikasi perijinan 2 (dua) orang dan Tenaga operator komputer 1 (satu) orang.

#### 5. Sarana Prasarana

Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao didukung dengan sarana dan prasarana sebagai berikut :

##### a. Kendaraan Dinas

Jumlah kendaraan dinas Roda 4, 1(Satu) unit dan 9 (sembilan) unit kendaraan roda dua dan 2 (dua) unit kendaraan roda dua yang merupakan aset Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao. Adapun perincian peruntukan dan pendistribusiannya adalah sebagai berikut :

- 1) Kendaraan Bermotor Roda Empat, yaitu 1 unit cary mini bus Nomor Polisi DH 172 YU untuk kendaraan operasional Pelayanan Perijinan yang saat ini berada dibawah tanggung

jawab Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao.

2) Kendaraan Bermotor Roda Dua, terdiri dari 9 unit :

- a) 7 (tujuh) unit dalam keadaan rusak berat
- b) 2 (dua) unit dalam keadaan kurang baik

b. Peralatan Kantor dan Aset lainnya.

Sarana prasarana kedinasan berupa peralatan kantor dan aset seperti mebelair, mesin tik, komputer dan lain-lain yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao sebagai berikut :

**Tabel 1.4.**  
**Keadaan Peralatan Kantor dan Aset Lainnya**

<b>N0</b>	<b>NAMA /JENIS BARANG</b>	<b>TAHUN PEROLEHAN</b>	<b>JLH BARANG</b>	<b>KEADAAN BARANG (B/KB/RB)</b>
<b>A.</b>	<b>KENDARAAN RODA EMPAT</b>			
<b>1</b>	MINIBUS	2011	1	KB
	<b>JUMLAH</b>		<b>1</b>	
<b>B.</b>	<b>KENDARAAN RODA DUA</b>			
	HONDA WIN	2004	1	RB
	HONDA WIN	2004	1	RB
	HONDA KHARISMA	2006	1	RB
	HONDA REVO	2010	1	RB
	SUZUKI UY 125	2010	1	KB
	HONDA REVO	2011	1	RB
	HONDA REVO	2011	1	RB
	HONDA REVO	2011	1	RB
	HONDA REVO	2013	1	KB
	<b>JUMLAH</b>		<b>9</b>	

<b>C.</b>	<b>DATA ASET</b>			
<b>1.</b>	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	2004	1	RB
<b>2.</b>	Mesin Ketik Manual Longewagen-18	2004	1	RB
<b>3.</b>	Brand Kas	2004	1	RB
<b>4.</b>	Lemari Kaca	2004	1	RB
<b>5.</b>	Lemari Kaca	2004	1	RB
<b>6.</b>	Lemari kayu	2004	1	RB
<b>7.</b>	Papan Nama Instansi	2004	1	RB
<b>8.</b>	Papan Nama Instansi	2004	1	RB
<b>9.</b>	Papan Pengumuman	2004	1	RB
<b>10.</b>	Panel Pameran	2004	1	RB
<b>11.</b>	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	2004	2	RB
<b>12.</b>	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	2004	1	RB
<b>13.</b>	Papan Nama Ruangan/Jabatan	2004	1	RB
<b>14.</b>	Kursi Besi/Metal	2004	1	RB
<b>15.</b>	Kursi Besi/Metal	2004	1	RB
<b>16.</b>	Kursi Besi/Metal	2004	1	RB
<b>17.</b>	Kursi Besi/Metal	2004	10	RB
<b>18.</b>	Kursi Besi/Metal	2004	1	RB
<b>19.</b>	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	2004	1	RB
<b>20.</b>	Kursi Putar	2004	10	RB
<b>21.</b>	Meja Biro	2004	1	RB
<b>22.</b>	Meja Biro	2004	7	RB
<b>23.</b>	Kaca Bening	2004	1	RB
<b>24.</b>	Jam Elektronik	2004	7	RB
<b>25.</b>	Kipas Angin	2004	1	RB
<b>26.</b>	Alat Dapur Lainnya	2004	2	RB
<b>27.</b>	Televisi	2004	6	RB
<b>28.</b>	Wireless	2004	1	RB
<b>29.</b>	Camera Film	2004	1	RB
<b>30.</b>	Kaca Hias	2004	1	RB
<b>31.</b>	Dispenser	2004	2	RB
<b>32.</b>	Lampu Emergency	2004	1	RB
<b>33.</b>	P.C Unit/ Komputer PC	2004	2	RB
<b>34.</b>	Printer	2004	2	RB
<b>35.</b>	Camera + Attachment	2004	1	RB
<b>36.</b>	Pesawat Telephone	2004	2	RB
<b>37.</b>	Facsimile	2004	1	RB
<b>38.</b>	Lambang Negara (Garuda)	2004	1	RB
<b>39.</b>	Gambar Presiden	2004	1	RB

40.	Gambar Wakil Presiden	2004	1	RB
41.	Scanner	2005	1	RB
42.	Filling Besi/Metal	2005	2	RB
43.	Rak Kaca	2005	2	RB
44.	Lemari Kayu	2005	1	RB
45.	Kursi Lipat	2005	7	RB
46.	Meja Komputer	2005	2	RB
47.	Meja Biro	2005	3	RB
48.	Meja Biro	2005	1	RB
49.	Meja Biro	2005	3	RB
50.	Kaca Bening	2005	7	RB
51.	Kipas Angin	2005	1	RB
52.	Kipas Angin	2005	2	RB
53.	P.C Unit/ Komputer PC	2005	1	RB
54.	Personal Komputer Lain-lain	2005	1	RB
55.	Printer	2005	1	RB
56.	Printer	2005	1	RB
57.	Server	2005	1	RB
58.	Hub	2005	1	RB
59.	Modem	2005	1	RB
60.	Lensa Kamera	2005	1	RB
61.	Alat Pengangkat Lain-lain	2006	1	RB
62.	Papan Nama Instansi	2006	3	RB
63.	Overhead Projektor	2006	1	RB
64.	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	2006	20	RB
65.	Lemari Kayu	2006	2	RB
66.	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	2006	1	RB
67.	Meja Rapat	2006	10	RB
68.	Kursi Lipat	2006	10	RB
69.	Meja Biro	2006	1	RB
70.	Meja Biro	2006	2	RB
71.	Sofa	2006	1	RB
72.	Kaca Bening	2006	1	RB
73.	AC Unit	2006	3	RB
74.	Stabilisator	2006	1	RB
75.	Dispenser	2006	1	RB
76.	Printer	2006	1	RB
77.	UPS	2006	2	RB
78.	Layar Proyektor	2006	1	RB
79.	Wireless Amplifier	2006	1	RB
80.	Fibertec Holdher (Stainless Steel 1000 ML)	2006	1	RB
81.	Mesin Ketik Manual Longewagen -18	2007	1	RB
82.	Mesin Calculator	2007	2	RB
83.	Lemari Kaca	2007	1	
84.	Alat Kantor Lainnya (Terali Besi)	2007	5	
85.	Jam Elektronik	2007	1	RB

86.	Jam Elektronik	2007	1	RB
87.	Note Book	2007	1	RB
88.	Flashdisk	2007	2	RB
89.	UPS	2007	1	RB
90.	Fibertec Holdher (Stainless Steel 1000 ml)	2007	1	RB
91.	Ensyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2007	2	RB
92.	Ekonom	2007	5	RB
93.	Hukum	2007	5	RB
94.	Perdagangan	2007	3	RB
95.	Teknologi	2007	4	RB
96.	Terbitan Berkala Lain-lain	2007	1	RB
97.	Mesin Calculator	2008	1	RB
98.	Papan Nama Instansi	2008	3	RB
99.	AC Unit	2008	1	RB
100.	AC Unit	2008	1	RB
101.	Hard Disk	2008	2	RB
102.	Printer	2008	3	RB
103.	UPS	2008	2	RB
104.	Lemari Buku untuk Pejabat Eselon III	2008	2	
105.	Camera + Attachment	2008	1	RB
106.	Facsimile	2008	1	RB
107.	Mesin Calculator	2009	3	RB
108.	Papan Nama Instansi	2009	1	RB
109.	Papan Nama Instansi	2009	1	RB
110.	Lemari Kayu	2009	1	
111.	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	2009	3	
112.	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	2009	60	
113.	Meja Biro	2009	3	
114.	Jam Elektronik	2009	1	RB
115.	Gambar Presiden/Wakil Presiden	2009	1	RB
116.	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2009	10	RB
117.	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2009	50	RB
118.	Printer	2009	3	RB
119.	Mouse	2009	2	RB
120.	Mesin Calculator	2010	1	RB
121.	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	2010	3	
122.	Meja Biro	2010	2	
123.	Meja Biro	2010	1	
124.	Meja Biro	2010	1	
125.	Meja Biro	2010	1	
126.	Gambar Presiden/Wakil Presiden	2010	2	RB
127.	Note Book	2010	2	RB
128.	Printer	2010	1	RB
129.	Printer	2010	2	RB
130.	Keyboard	2010	1	RB

131.	UPS	2010	2	RB
132.	Harddisk Internal	2010	2	RB
133.	Harddisk Internal	2010	1	RB
134.	Mesin Calculator	2011	1	RB
135.	Lemari Kayu	2011	3	
136.	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	2011	4	
137.	Meja Biro	2011	4	
138.	Note Book	2011	2	
139.	Printer	2011	1	
140.	Camera + Attachment	2011	1	
141.	Mesin Hitung Manual	2012	1	
142.	Lap Top	2012	1	
143.	Printer	2012	1	
144.	Mesin Hitung Manual	2013	2	
145.	P.C Unit/ Komputer PC	2013	1	
146.	Lap Top	2013	1	
147.	Printer	2013	2	
148.	Facsimile	2013	1	
149.	Lap Top	2015	1	
150.	Mesin Cetak Listrik Elektronik	2015	1	
151.	Mesin Hitung Manual	2016	2	
152.	Kursi Kerja	2016	7	
153.	Lap Top	2016	3	
154.	Printer	2016	2	
155.	Meja Kerja	2016	7	
156.	Laptop	2017	3	
157.	Printer	2017	2	
158.	Printer	2017	4	
159.	Printer	2018	2	
160.	Peralatan Mini Komputer	2018	1	
161.	Laptop	2019	1	
162.	Komputer PC	2019	3	
163.	Lap Top	2019	1	
164.	Printer A 4	2019	2	
165.	Printer A 3	2019	1	
166.	Laptop	2019	1	
167.	AC 1 Pk	2019	3	
<b>JUMLAH</b>			<b>472</b>	
<b>D</b>	<b>GEDUNG</b>			
<b>1</b>	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2004	1	B
<b>2</b>	Bangunan Gedung Tempat Tempat Pertemuan / Aula	2008	1	B
<b>JUMLAH</b>			<b>2</b>	

#### **D. Dasar Hukum**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2022 berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Ketetapan MPR Nomor 11/ MPR/ 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Permenpan-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
8. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 54 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 84 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024.

#### **E. Sistematika Pelaporan**

LKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:



## **Kata Pengantar**

## **Ikhtisar Eksekutif**

## **Daftar Isi**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, gambaran umum, dasar hukum, dan sistematika penyusunan LKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2022.

#### **A. Latar Belakang.**

Menguraikan mengenai ketentuan yang melandasi penyusunan LKIP

#### **B. Maksud Dan Tujuan.**

Menjelaskan dalam rangka maksud disusunnya LKIP dan tujuan yang diharapkan dari penyusunan LKIP.

#### **C. Gambaran Umum.**

Menjelaskan secara singkat gambaran umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao mengenai tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya manusia dan sarana prasarana organisasi.

#### **D. Dasar Hukum.**

Menjelaskan mengenai peraturan-peraturan yang mendasari penyusunan LKIP.

#### **E. Sistematika Laporan.**

Menjelaskan mengenai sistematika penyusunan LKIP.

### **BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019-2024**

Pada bagian ini disajikan gambaran mengenai Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

##### **1. Pernyataan Visi dan Misi**

###### **a. Visi**

Menguraikan mengenai definisi dari visi dan mengungkapkan pernyataan visi Pemerintah beserta kandungan maknanya.

###### **b. Misi**

Menjelaskan mengenai definisi dari misi dan menguraikan mengenai pernyataan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao.

2. Penetapan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Menjelaskan mengenai Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang ditetapkan dan akan dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao

B. Indikator Kinerja Utama.

Menjelaskan Sasaran, Indikator Kinerja Utama dan Formula Pengukurannya.

C. Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022.

Menguraikan sasaran, indikator kinerja sasaran dan targetnya pada masing – masing indikator kinerja Tahun Anggaran 2022.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

B. Capaian Kinerja

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

D. Kinerja Keuangan

E. REALISASI ANGGARAN

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan dari LKIP.

## BAB II

### RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

*P*erencanaan Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024, dimaksudkan untuk menciptakan komitmen dalam rangka membangun sistem akuntabilitas dan kinerja sebagai salah satu upaya penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan untuk memberikan arah dan pedoman Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao dalam mencapai Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Penyusunan Rencana Strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan bahwa sistem perencanaan pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Salah satu rencana pembangunan yang perlu disusun adalah Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang diamanatkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 25 ayat (2) dan (3) yang antara lain menyatakan bahwa Renstra Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

#### A. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019-2024.

RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao adalah dokumen yang memuat suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada yang mungkin timbul. Penyusunan Renstra disamping mengacu pada RPJMD, juga perlu memperhatikan evaluasi kinerja Perangkat Daerah terhadap implementasi Renstra pada 5 (lima) tahun sebelumnya.

1. Pernyataan Visi dan Misi :

a. Visi.

Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao mengarah pada perwujudan Visi Pembangunan Kabupaten Rote Ndao yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2019–2024, yaitu: **“Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao Yang BERMARTABAT Dan Berkelanjutan Bertumpu Pada Pariwisata Yang Didukung Oleh Pertanian dan Perikanan”**.

BERMARTABAT terdiri dari kata **Bertumbuh**, **Makmur**, **Taat** dan **Bersahabat**, yang dapat diartikan sebagai harkat atau harga diri, yang menunjukkan eksistensi masyarakat Kabupaten Rote Ndao, namun juga memiliki makna :

➤ **BERTUMBUH :**

- Maju : meningkatnya daya saing ekonomi daerah, kapasitas infrastruktur daerah, kualitas sumber daya manusia serta pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan.
- Mandiri: masyarakat yang mampu mencukupi kebutuhannya dengan layak, mampu mengembangkan potensi diri dan menyediakan yang belum ada bagi diri dan daerahnya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehingga ketergantungan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan semakin berkurang.

➤ **MAKMUR / SEJAHTERA :**

- Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang sehat sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.
- Meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat.
- Pemerataan tingkat pendapatan masyarakat.
- Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.
- Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia dan indikator pembangunan lainnya.

- Munculnya kekuatan-kekuatan ekonomi rakyat baru yang mampu meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang layak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.
- Terwujudnya tatanan kehidupan aman dan tentram.

➤ **TAAT :**

- Religius, damai, harmonis, taat kepada ketentuan peraturan/ perundang-undangan, nasionalis.
- Saling menghargai berbagai perbedaan (suku dan agama) dan status sosial antar sesama warga, toleran dan penuh kegotong-royongan yang di dukung kondisi aman dan tentram.

➤ **BERSAHABAT :**

- Ramah, penuh kasih, bersih, elok, tertata rapi, ceria, hijau, indah, aman dan jaya.
- Terbuka yang di dukung dengan atmosfir kultural yang tidak melihat perbedaan sebagai asing, musuh dan ancaman.

b. Misi.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah sesuai dengan visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan Misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan, dapat mengenal Instansi Pemerintahannya serta mengetahui peran dan program-programnya untuk menentukan keberhasilan dimasa yang akan datang.

Dalam rangka mewujudkan Visi, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao mengemban Misi ke -4 Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima”**, sebagai upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good government*) dan bersih (*clean government*) serta kualitas kebijakan pelayanan publik yang unggul, Maka diperlukan peningkatan kualitas pelayanan perizinan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan agar tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan melalui

peningkatan kapasitas pelayanan Sumber Daya Aparatur aparaturnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao yang profesional dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

## 2. Penetapan Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Strategis.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, dengan menjawab isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan layanan dan tugas serta fungsi perangkat daerah. Dengan diformulasikannya tujuan berdasarkan Visi dan Misi yang diemban, maka tujuan strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao adalah :

***“Meningkatnya Investasi dan Meningkatnya Transparansi dan Responsibilitas Pelayanan Publik”.***

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran mempertimbangkan tugas dan fungsi serta tujuan strategis yang akan dicapai, maka sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao yakni :

### ***1. Meningkatnya transparansi dan responsibilitas Pelayanan Publik***

### ***2. Meningkatnya Investasi***

### ***3. Meningkatnya Pelayanan Perizinan***

Berdasarkan sasaran diatas, maka kebijakan-kebijakan strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao antara lain :

- a. Meningkatkan data base potensi unggulan daerah;
- b. Menciptakan iklim usaha yang kondusif;
- c. Penataan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparaturnya dan
- d. Meningkatkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, dan berkualitas berbasis IT.

### 3. Program dan Kegiatan.

Untuk mencapai Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao, maka Program dan Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

Pencapaian Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Strategis Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao dilaksanakan melalui 4 (empat) Program, yaitu : 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 2) Program Promosi Penanaman Modal, 3) Program Pelayanan Penanaman Modal, 4) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang terdiri dari 10 (sepuluh) kegiatan dan 19 (sembilan belas) sub kegiatan yaitu:

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan rincian Sub Kegiatan yaitu:
  - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; dan
  - 2) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, melalui Sub Kegiatan :
  - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - 2) Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah, melalui Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.
- d. Kegiatan Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah, melalui Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepagawaian.
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan rincian Sub Kegiatan yaitu:
  - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
  - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik
  - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
  - 4) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan rincian Sub Kegiatan yaitu:
  - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat; dan
  - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.



- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan rincian Sub Kegiatan yaitu:
  - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
  - 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- h. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dengan sub kegiatan Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota;
- i. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman modal;
- j. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, dengan rincian Sub Kegiatan yaitu:
  - a. Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal;
  - b. Sub Kegiatan Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal;

## **B. Indikator Kinerja Utama**

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, maka Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Mengacu pada Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 54 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 84 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024, maka Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1.**  
**Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*)**

<b>Sasaran</b>	<b>Indikator</b>		<b>Formula Pengukuran</b>
<b>Meningkatnya Transparansi dan Responsibilitas Pelayanan Publik</b>	1	Indeks Kepuasan Pelayanan Publik	Rata-rata Skor Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Unit Pelayanan Publik Yang Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat
<b>Meningkatnya Investasi</b>	1.	Meningkatnya Investasi berskala nasional	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)
	2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)
	3.	Realisasi investasi PMDN/PMA	Jumlah nilai realisasi investasi berskala nasional (PMDN/PMA)
<b>Meningkatnya Pelayanan Perizinan</b>	1.	Persentase Bangunan/ Usaha Berijin	Realisasi Bangunan / Usaha berijin/ Target Bangunan/Usaha Berijin x 100

### C. Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai antara pihak yang menerima amanah/ tanggungjawab kinerja dengan pihak yang memberi amanah/tanggung jawab. Perjanjian kinerja yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan dapat berguna untuk perencanaan prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan Perangkat Daerah akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan yang tidak terarah. Perjanjian Kinerja ditetapkan dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*), Rencana Kinerja Tahunan, APBD Tahun Anggaran 2022, Strategi dan Prioritas APBD Tahun Anggaran 2022 dan DPA Tahun Anggaran 2022.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2022 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.2.**  
**Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022**

No	Sasaran	Indikator kinerja	Target kinerja
1	2	3	4
1	Meningkatnya Transparansi dan Responsibilitas Pelayanan Publik	<b>1.1. Indeks Kepuasan Pelayanan Publik</b>	<b>80 Poin</b>
2	Meningkatnya Investasi	2.1 Meningkatnya investasi berskala nasional	70 PMA/PMDN
		2.2 Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	165.000.000.000
		2.3. Realisasi investasi PMDN/PMA	100.000.000.000
3	Meningkatnya Pelayanan Perizinan	3.1 Persentase Bangunan/ Usaha Berijin	70 %

### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari sasaran melalui instrumen pertanggung jawaban secara periodik.

Laporan Kinerja Instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Program dan Kegiatan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki Perangkat Daerah.

Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi organisasi.

#### **A. Kerangka Pengukuran Kinerja**

Kerangka pengukuran kinerja dilakukan mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, yang dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi dari setiap indikator kinerja disertai dengan analisis capaian kinerja antara lain:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis RPJMD; dan
- Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan

sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Alat ukur pengukuran kinerja adalah dengan menggunakan indikator kinerja. Kerangka pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

- a) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Selanjutnya untuk memudahkan dalam memberikan gambaran terhadap kinerja yang telah diperjanjikan maka penyimpulan hasil pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran dan tujuan sebagai berikut:

**Tabel 3.1.**  
**Pengukuran Skala Ordinal Capaian Kinerja**

Interval Nilai Realisasi Kinerja (%)	Kategori
> 90	Sangat Tinggi
> 75 s.d 90	Tinggi
> 65 s.d 75	Sedang
≥ 50 s.d 65	Rendah
< 50%	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas/kategori) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

- **Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi**  
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
- **Hasil Sedang**  
Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja telah memenuhi persyaratan minimal.
- **Hasil Rendah dan Sangat Rendah**  
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Analisa hasil pengukuran capaian masing-masing indikator kinerja dinilai sebagai berikut:

Realisasi Kinerja ≥ Target Kinerja	:	Mencapai/Melampaui Target
Realisasi Kinerja < Target Kinerja	:	Belum Mencapai Target
Realisasi Kinerja > Realisasi Tahun Sebelumnya	:	Peningkatan
Realisasi Kinerja < Realisasi Tahun Sebelumnya	:	Penurunan

Untuk mengukur efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja digambarkan melalui efisiensi penggunaan anggaran yakni selisih persentase realisasi anggaran total alokasi anggaran, jika persentase efisiensi anggaran sebesar >0% maka dikategorikan **“Efisien”**, semakin besar presentase efisiensi anggaran maka penggunaan sumberdaya semakin efisien, sebaliknya jika persentase efisiensi anggaran sebesar ≤0% maka dikategorikan **“Kurang Efisien”**.

Untuk mengukur efektifitas penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja digambarkan melalui rasio persentase capaian kinerja sasaran terhadap persentase realisasi anggaran program pendukung, jika nilai rasio  $\geq 1$  maka dikategorikan **“Efektif”** dan sebaliknya jika nilai rasio  $< 1$  sehingga dikategorikan **“Kurang Efektif”**.

## B. Capaian Kinerja

Mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022, maka capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2022 digambarkan sebagai berikut:

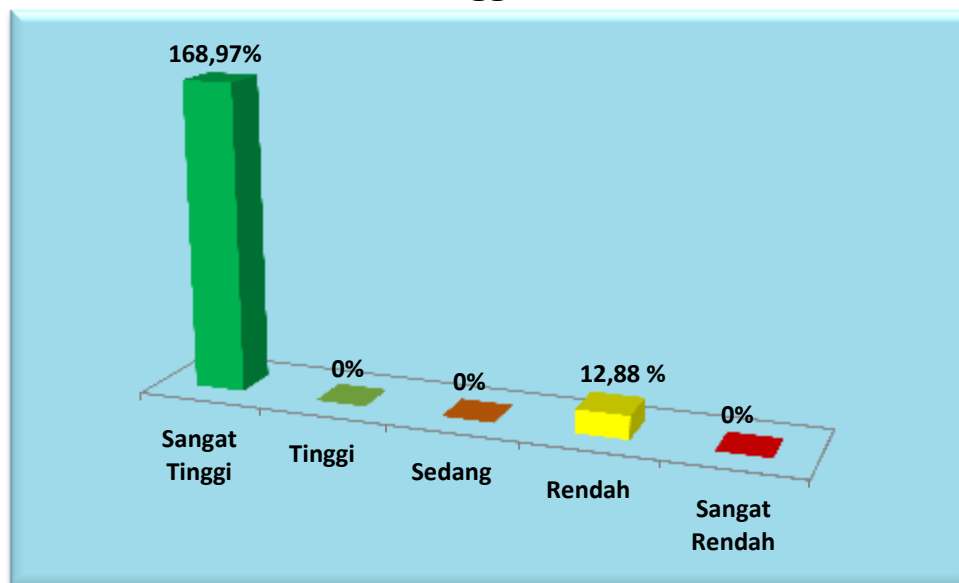
**Tabel 3.2.**  
**Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan**  
**Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao**  
**Tahun Anggaran 2022**

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	6 = (5/4)x100	7
Meningkatnya transparansi dan responsibilitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Pelayanan Publik	Poin	80	90,21	112,76	Sangat Tinggi
	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 1				112,76	Sangat Tinggi
Meningkatnya Investasi	Meningkatnya Investasi berskala nasional	PMDN / PMA	70	74	105,71	Sangat Tinggi
	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rupiah	165.000.000.000	788.394.339.000	477,81	Sangat Tinggi
	Realisasi Investasi PMDN/PMA	Rupiah	100.000.000.000	64.423.980.161	64,42	Rendah
	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 2				215,98	Sangat Tinggi
Meningkatnya Pelayanan Perizinan	Persentase Bangunan/Usaha Berijin	%	70	104	148,57	Sangat Tinggi
	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 3				148,57	Sangat Tinggi
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA					181,86	Sangat Tinggi



Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2022 yang terdiri dari 3 (tiga) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja sebesar **181,86%** atau dikategorikan **“Sangat Tinggi”**, dengan rata-rata capaian kinerja Sasaran **Meningkatnya Transparansi dan Responsibilitas Pelayanan Publik** sebesar 112,76% (*Sangat Tinggi*), rata-rata capaian kinerja **Sasaran Meningkatnya Investasi** sebesar 215,98% (*Sangat Tinggi*) dan **Meningkatnya Pelayanan Perizinan** sebesar 148,57% (*Sangat Tinggi*).

**Gambar 3.1**  
**Tingkat Capaian Indikator Kinerja**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Kabupaten Rote Ndao**  
**Tahun Anggaran 2022**



*Sumber : Data Olahan, 2022*

Hasil pengukuran terhadap Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2022 menunjukkan bahwa:

- a. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Sangat Tinggi*” sejumlah 4 (Empat) indikator atau 168,97%;
- b. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Tinggi*” sejumlah 0 indikator atau 0%;

- c. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “Sedang” sejumlah 0 indikator atau 0%;
- d. Indikator *kinerja* yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Rendah*” sejumlah 1 indikator atau 12,88%; dan
- e. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Sangat Rendah*” sejumlah 0 indikator atau 0%.

### C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2022 akan diuraikan berdasarkan aspek capaian kinerja sasaran sebagaimana secara umum telah diuraikan dalam penyajian capaian kinerja pada bagian sebelumnya.

#### SASARAN 1

##### **Meningkatnya transparansi dan Responsibilitas Pelayanan Publik**

Seiring berkembang dan bertambahnya kebutuhan masyarakat membuat pemerintah sadar akan tanggung jawabnya dalam memenuhi pelayanan publik, maka penguatan akuntabilitas, transparansi dan responsibilitas birokrasi pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. Sejalan dengan itu, penataan birokrasi pemerintah perlu dilaksanakan secara optimal guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas instansi pemerintah pelayanan publik.

Tata kelola pemerintahan yang baik berarti tata kelola pemerintahan yang mencerminkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah.

#### 1. Indeks Kepuasan Pelayanan Publik

Indikator Indeks Kepuasan Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao adalah capaian rata-rata skor nilai indeks kepuasan masyarakat pada unit

pelayanan publik dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Rote Ndao. Pelayanan publik (*public service*) oleh aparatur pemerintah merupakan perwujudan fungsi aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada masyarakat. Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, setiap instansi pemerintah berkewajiban menyediakan pelayanan publik untuk dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Berbagai keperluan dan kepentingan masyarakat dalam kaitannya dengan urusan birokrasi harus dipenuhi dengan baik. Pelayanan prima menjadi hal yang harus dikedepankan dalam melayani masyarakat.

Indikator Indeks Kepuasan Pelayanan Publik merupakan aspek penting sebagai bentuk evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, dengan melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pada tahun 2022, pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilakukan oleh unit pelayanan publik dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Rote Ndao.

Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 sebesar 90,21% dengan perhitungan sebagai berikut :

Berdasarkan penilaian hasil survey maka nilai indeks unit pelayanan dari masing – masing izin sebagai berikut :

1. Rekomendasi Penelitian adalah ;

a. Nilai IKM setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar = 3.601  
x 25 = **90,02**

- b. Mutu Pelayanan = A
- c. Kinerja Unit Pelayanan = Sangat Baik
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah ;
- a. Nilai IKM setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar =  
 $3.616 \times 25 = \mathbf{90,40}$
- b. Mutu Pelayanan = A
- c. Kinerja Unit Pelayanan = Sangat Baik
- Dengan demikian nilai indeks unit pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao dapat disampaikan sebagai berikut :
- a. Nilai IKM setelah dikonversi =  $\frac{90,02 + 90,21}{2} = \mathbf{90,21}$
- b. Mutu Pelayanan = A
- c. Kinerja Unit Pelayanan = Sangat Baik

**Tabel 3.3.**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran**  
**Meningkatnya Transparansi dan Responsibilitas Pelayanan Publik**

Pengukuran									
No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021	Tahun 2022			Target Akhir RENSTRA 2024	% realisasi 2022 terhadap tahun 2021	% realisasi 2022 terhadap Target Akhir RENSTRA 2024
				Target	Realisasi	% Capaian			
1.	Indeks Kepuasan Pelayanan Publik	Poin	107,97	80,00	90,21	112,76	90	83,55	100,23
Rata-Rata Capaian Kinerja Tujuan						112,76	Sangat Tinggi		

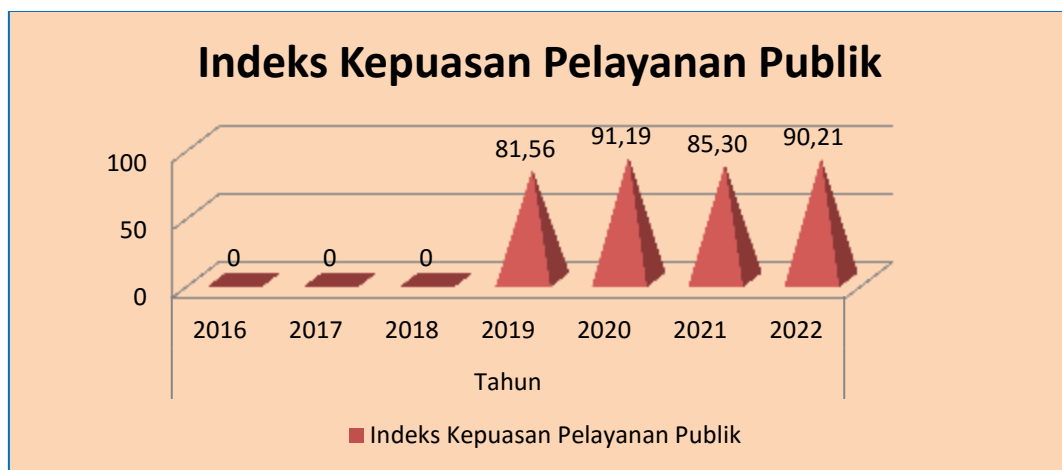
Tabel diatas menunjukkan bahwa Indeks Kepuasan Pelayanan Publik atau rata-rata skor nilai indeks kepuasan masyarakat pada unit pelayanan publik dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Rote Ndao tahun 2022 sebesar 90,21 poin, sehingga disimpulkan bahwa Indeks Kepuasan Pelayanan Publik tahun 2022 sebesar 90,21 poin.

Hasil pengukuran indikator kinerja menunjukkan bahwa capaian kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan Publik telah melampaui target yang ditetapkan. Pada tahun 2022, Indeks Kepuasan Pelayanan

Publik ditargetkan sebesar 80 poin dan terealisasi sebesar 90,21 poin dengan capaian kinerja sebesar 112,76%.

Capaian kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan Publik tahun 2022 sebesar 90,21 poin jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya (tahun 2021) sebesar 107,97 poin, menunjukkan bahwa capaian tahun 2022 sudah melampaui capaian kinerja tahun sebelumnya dengan penambahan sebesar 4,91 poin dan capaian kinerja sebesar 112,76%. Dari tahun sebelumnya.

**Gambar 3.2.**  
**Tren Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Publik**  
**Tahun 2020-2021**



Tren realisasi indikator kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan Publik selama 4 (empat) tahun terakhir menunjukkan capaian yang mengalami kinerja yang fluktuatif yakni tahun 2019, 2020, meningkat namun pada tahun 2021 menurun sebesar 5,89, poin dikarenakan berkurangnya 1 unsur penilaian dari tahun 2020 yaitu Unsur Ruang Pelayanan sedangkan tahun 2022 meningkat menjadi 90,21 poin.

Realisasi indikator kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan Publik tahun 2022 sebesar 90,21 poin jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024 (sebagai tahun akhir RENSTRA 2019-2024) yaitu sebesar 90 poin, menunjukkan bahwa target akhir RENSTRA melampau sebesar 21 poin, sehingga perlu dipertahankan.

Berdasarkan pengukuran kinerja dan uraian penjelasan diatas, disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Transparansi dan Responsibilitas Pelayanan Publik Akuntabilitas Kinerja** Tahun Anggaran 2022 sebesar **112,76%** atau dikategorikan **“Sangat Tinggi”**.

Keberhasilan atas pencapaian kinerja sasaran ini sangat dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Adanya pengalihan pengurusan perijinan dari *offline* ke *online* (melalui system Online Single Submission Risk Based Area / OSS-RBA) sehingga banyak pelaku usaha dan masyarakat dimudahkan melalui pelayanan tersebut.
- 2) Efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya-upaya perbaikan dan inovasi dari segala aspek secara terus menerus dalam rangka peningkatan pelayanan perizinan kepada masyarakat secara optimal
- 3) Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam mengemban Misi ke-4 Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Periode Tahun 2019-2024 yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima”** melalui upaya-upaya peningkatan pelayanan di Bidang Perizinan dan Penanaman Modal

Meskipun terdapat faktor-faktor pendukung keberhasilan diatas, pencapaian kinerja sasaran masih menghadapi hambatan dan kendala antara lain:

- 1) Belum optimalnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal;
- 2) Masih terbatasnya SDM aparatur yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang menguasai informasi dan teknologi, sistim aplikasi pelayanan perizinan, *Online Single Submission* (OSS) serta operator SIPID, SPIPISE dan lain sebagainya;
- 3) Belum tersedianya Gedung Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Yang representative

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran ini kedepan maka akan ditempuh langkah - langkah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam urusan Perizinan dan Penanaman modal;
- 2) Peningkatan kualitas Sumberdaya Aparatur yang menguasai informasi dan teknologi, sistim aplikasi pelayanan perizinan, *Online Single Submission* (OSS) serta operator SIPID, SPIPISE dan lain sebagainya;
- 3) Penyediaan Gedung Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Yang representative

Program yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini adalah Program Pelayanan Penanaman Modal, yang dilaksanakan melalui kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, meliputi Sub Kegiatan Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan Non Perizinan penanaman modal, dengan dukungan anggaran sebesar Rp.153.998.530,- (*Seratus Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Rupiah*) terealisasi sebesar Rp.152.628.423,- (*Seratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah*) atau sebesar 99,11%.

Efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya melalui pelaksanaan program dan alokasi anggaran tahun 2022 terhadap pencapaian kinerja sasaran ini dapat digambarkan dengan pengukuran besaran efisiensi anggaran dan rasio capaian kinerja terhadap realisasi anggaran tahun 2022 sebagai berikut:

**Tabel 3.4.**  
**Tingkat Efisiensi Pencapaian Kinerja Sasaran**  
**Meningkatnya Transparansi dan Responsibilitas Pelayanan Publik**

Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Realisasi Anggaran Program Pendukung Tahun 2022 (%)	Tingkat Efisiensi		Tingkat Efektifitas	
		Efisiensi Anggaran (%)	Kategori	Rasio Capaian Kinerja Terhadap Anggaran	Kategori
(1)	(2)	(3) = 100 – (2)	(4)	(5) = (1)/(2)	(6)
112,76	99,11	0,89	Efisien	1,14	Efektif

Tampilan tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi anggaran program pendukung capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Transparansi dan Responsibilitas Pelayanan Publik** mencapai tingkat efisiensi sebesar 0,89% atau dikategorikan Efisien. Selain itu, rasio capaian kinerja sasaran terhadap realisasi anggaran program pendukung menunjukkan tingkat efektifitas berada pada nilai rasio >1 sehingga dikategorikan Efektif.

<b>SASARAN 2</b>
<b>Meningkatnya Investasi</b>

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “**MENINGKATNYA INVESTASI**” maka dapat di jelaskan sebagai berikut:

**Tabel 3.5.**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran**  
**Meningkatnya Investasi**

Pengukuran									
No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021	Tahun 2022			Target Akhir RESNTRA 2024	% realisasi 2022 terhadap tahun 2021	% realisasi 2022 terhadap Target Akhir RESNTRA 2024
				Target	Realisasi	% Capaian			
1.	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMA/PMDN)	PMA/PMDN	60	70	74	105,71	81	123	91,36
2.	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (x1.000.000)	RP	493.030.235.000	165.000.000.000	788.394.339.000	477,81	175.000.000.000	160	451
3.	Realisasi Investasi	RP	119.446.795.389	100.000.000.000	64.423.980.161	64,42	110.000.000.000	54	59
Rata-Rata Capaian Kinerja						215,98	Sangat Tinggi		



Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa untuk mengukur kinerja sasaran **Meningkatnya Investasi** terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yaitu :

- 1) Meningkatnya Investasi berskala nasional
- 2) Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)
- 3) Realisasi Investasi PMDN/PMA

Penjelasan atas capaian indikator kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

#### **1) Meningkatnya Investasi Berskala Nasional**

- 1) Indikator Meningkatnya Investasi Berskala Nasional adalah Jumlah Investasi berskala nasional PMDN/PMA) adalah Jumlah Investor berskala nasional yang didalamnya terdiri dari investor yang melakukan penanaman modal asing secara langsung dan investor yang menggunakan modal dalam negeri bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi di Kabupaten Rote Ndao.

Jumlah Investor berskala nasional (PMA/PMDN) di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 sebanyak 74 PMA/PMDN yaitu :

1. PT. Tower Bersama, Lokasi Kecamatan Rote Timur
2. PT. Tower Bersama, Lokasi Kecamatan Ndao Nuse
3. PT. Rotenda Energi Indonesia, Lokasi Kecamatan Lobalain
4. PT. Inter Galactic Rote, Lokasi Kecamatan Rote Barat
5. PT. Loedi Naia Bros, Lokasi Kecamatan Rote Barat
6. PT. Lontar Mulia Rote, Lokasi Kecamatan Rote Barat
7. PT. Villa Oenggaut, Lokasi Kecamatan Rote Barat
8. PT. Mick Place Somewhere Else, Lokasi Kecamatan Rote Barat
9. PT. Coco Matahari Nemberala, Lokasi Kecamatan Rote Barat
10. PT. Mitra Graha Tangguh Perkasa, Lokasi Kecamatan Rote Barat
11. PT. Berkat Pantai Rote, Lokasi Kecamatan Rote Barat
12. PT. Limber Rote Wisata, Lokasi Kota Kupang
13. PT. Protelindo, Lokasi Kecamatan Lobalain
14. PT. Pachmama Pulau Rote, Lokasi Kecamatan Rote Barat
15. PT. Arta Abadi Nusantara, Lokasi Kecamatan Rote Barat
16. PT. Surya Energi Indotama, Lokasi Kecamatan Rote Timur
17. PT. Tunas Baru Abadi, Lokasi Kecamatan Rote Tengah

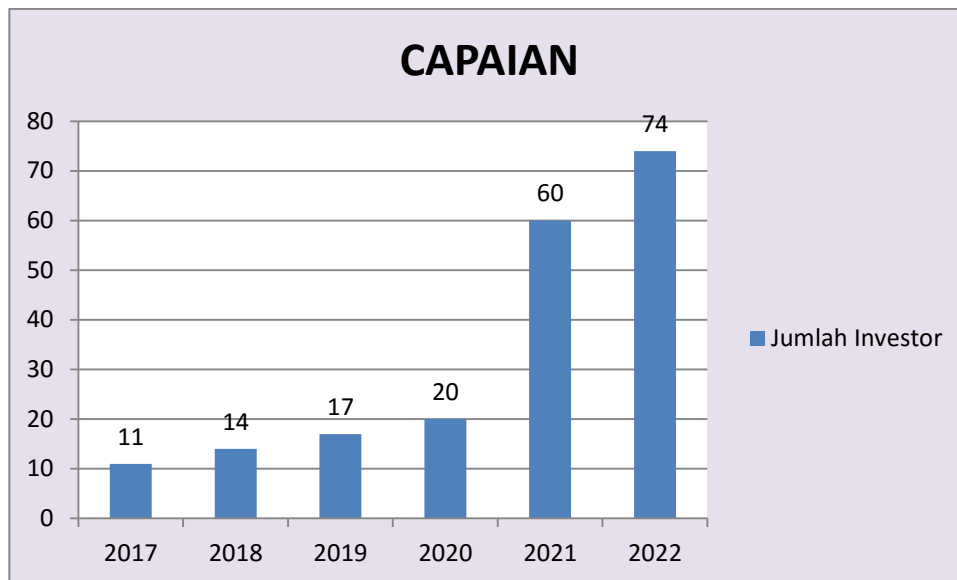
18. PT. Bukit Berkat Rote Wisata, Lokasi Kecamatan Rote Barat
19. PT. Langit Teduh Rote, Lokasi Kecamatan Rote Barat
20. PT. Roda Pembangunan Nusa Tenggara Lekunik Residence (PT. Anak Sulung Mandiri), Lokasi Kecamatan Lobalain
21. PT. Shang Che Garamindo, Lokasi Kecamatan Rote Timur
22. PT. Raja Biku Bibi Lokasi Kecamatan Rote Barat Daya
23. PT. Rote Timur Investment Kecamatan Rote Barat
24. PT. Indospain Global Investment Kecamatan Rote Barat
25. PT. PT. Manduna Eco Resort Kecamatan Rote Barat
26. PT. PT. Utopia Global Indo Kecamatan Rote Barat
27. PT. PT. T-land Resort Kecamatan Rote Barat
28. PT. PT. Nemberala Bulan Kecamatan Rote Barat
29. PT. PT. Asia Pacific Rote Kecamatan Rote Barat
30. PT. Laut Rote Persada Kecamatan Rote Barat
31. Hotel Grace Kecamatan Lobalain
32. Hotel Amelia Yoseph Kecamatan Lobalain
33. PT. Boa Development Kecamatan Rote Barat
34. PT. Wangsa Ananta Sakti Kecamatan Rote Barat
35. PT. Tower Bersama Kecamatan Pantai Baru
36. PT. PT. Telaga AkuaKU Indah Kecamatan Lobalain
37. PT. CV. Cinta Rote Kecamatan Rote Barat
38. PT. PT. Sasando Nusa Korbafo Kecamatan Lobalain
39. CV. New Ricky Hotel Kecamatan Lobalain
40. PT. Protelindo Kecamatan Rote Tengah
41. PT. Tower Bersama Kecamatan Lobalain
42. PT. Bali Island Realty Kecamatan Rote Barat
43. CV. Mulia Bungalow Kecamatan Rote Barat
44. PT. Santic Sari Dewi Kecamatan Rote Barat
45. PT. Alami Sejahtera Nusantara Kecamatan Rote Timur
46. PT. Dunia Indah Mulia Kecamatan Rote Barat
47. Hotel Freas Kecamatan Lobalain
48. Hotel Videsy Kecamatan Lobalain
49. CV. Bauana Group Kecamatan Lobalain
50. UD. Hebron Kecamatan Lobalain
51. CV. Tujuh Jaya Kecamatan Lobalain
52. CV. Triputra Jaya Kecamatan Lobalain
53. PT. Nemberala Paradise Kecamatan Rote Barat
54. PT. Rote Roots Bungalows Kecamatan Rote Barat
55. PT. Blue Ocean Adventure Kecamatan Rote Barat

56. PT. Rote Villa Management Kecamatan Rote Barat
57. PT. Outer Island Development Kecamatan Rote Barat
58. CV. Kampung Kakak Kecamatan Rote Barat
59. PT. Sanxi Cheng Xie Power Indonesia Kecamatan Rote Barat
60. Saindule Poultry Farm–Saindule Kecamatan Rote Barat Laut
61. PT. Kelapa Village Sedeeoen Kecamatan Rote Tengah
62. PT. Enda Lifu Rote Kecamatan Rote Barat
63. PT. Daya Alam Surya Indonesia Kecamatan Rote Timur
64. CV. Narrow Kecamatan Rote Barat
65. PT. Gabriel Gabryela Jaya Kecamatan Lobalain
66. PT. Anugerah Tirta Rote Kecamatan Rote Barat
67. CV. Anugerah 3.1 Kecamatan Rote Barat
68. CV. Vicherya Travel Kecamatan Lobalain
69. Vila Sedeeoen (Dorce Haninuna) Kecamatan Rote Barat
70. Paul Victor Pany Kecamatan Lobalain
71. Boa Clif Villas Kecamatan Rote Barat
72. Totem Dream Kecamatan Ndao Nuse
73. PT. Elgerindo Multi Produk Industri Kecamatan Rote Tengah
74. PT. Timor Nusa Dirgantara Kecamatan Lobalain

Hasil pengukuran indikator kinerja Meningkatnya Investasi berskala nasional menunjukkan bahwa capaian kinerja Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA) melampaui target yang ditetapkan. Pada tahun 2022, Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA) ditargetkan sebesar 70 PMA/PMDN dan terealisasi sebesar 74 PMA/PMDN dengan capaian kinerja sebesar 105,71%.

Capaian kinerja Meningkatnya Investasi berskala nasional tahun 2022 sebesar 105,71% jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya (tahun 2021) sebesar 90,91%, menunjukkan bahwa capaian tahun 2022 melampaui capaian kinerja tahun sebelumnya dengan peningkatan sebesar 14,80% dan capaian kinerja sebesar 105,71%.

**Gambar 3.3.**  
**Tren Meningkatnya Jumlah Investasi Berskala Nasional**  
**Tahun 2017-2022**



Tren realisasi indikator kinerja Meningkatnya Investasi Berskala Nasional selama 6 (Enam) tahun terakhir menunjukkan capaian yang mengalami peningkatan kinerja secara signifikan yakni periode tahun 2017-2022 terus mengalami peningkatan positif setiap tahunnya.

Realisasi Indikator kinerja Meningkatnya Investasi Berskala Nasional Tahun 2022 sebesar 74 PMA/PMDN jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024 (sebagai tahun akhir RENSTRA 2019-2024) yaitu berjumlah 81 PMDN/PMA, menunjukkan bahwa target akhir RENSTRA belum tercapai sebesar 7 PMA/PMDN (8,64 %). Sehingga upaya strategis akan terus dilakukan untuk meningkatkan guna mencapai target akhir RENSTRA tahun 2024.

## 2) Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

**Tabel 3.6.**  
**Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)**

<b>N O</b>	<b>NAMA PERUSAHAAN</b>	<b>BIDANG USAHA</b>	<b>NILAI INVESTASI (RP)</b>
1	PT. Tower Bersama	Konstruksi	450.000.000
2	PT. Tower Bersama	Konstruksi	450.000.000
3	PT. Rotenda Energi Indonesia	Perdagangan Eceran Bahan Bakar di SPBU	4.000.000.000
4	PT. Shang Che Garamindo	Tambak Garam	81.761.840.000
5	PT. Raja Biku Bibi	Hotel dan Restoran Bintang Tiga	2.500.000.000
6	PT. Rote Timur Investment	Penyediaan Akomodasi	20.000.000.000
7	PT. Indospain Global Investment	Penyediaan Akomodasi	2.725.200.000
8	PT. Manduna Eco Resort	Penyediaan Akomodasi	20.000.000.000
9	PT. Utopia Global Indo	Pembangunan Hotel	30.258.000.000
10	PT. T-land Resort	Jasa Akomodasi (hotel)	14.409.000.000
11	PT. Nemberala Bulan	Jasa Akomodasi, Restaurant	1.440.900.000
12	PT. Asia Pacific Rote	Pembangunan dan Pengoperasian Boa Beacch Resto dan Restaurant	12.968.100.000
13	PT. Laut Rote Persada	PT. Laut Rote Persada	10.880.000.000

14	Hotel Grace	Pembangunan Hotel	700.000.000
15	Hotel Amelia Yoseph	Operasi Kelola Hotel	500.000.000
16	PT. Boa Development	Pengelolaan Resort Pantai Boa	10.000.000.000
17	PT. Inter Galactic Rote	Jasa Akomodasi (Villa)	1.000.0000.000
18	PT. Wangsa Ananta Sakti	Pembangunan STONE CRUISER DAN AMP	4.000.000.000
19	PT. Tower Bersama	Pemb. Menara Tower Telekomunikasi	500.000.000
20	PT. Telaga AkuaKU Indah	Air Minum dalam Kemasan	2.000.000.000
21	CV. Cinta Rote	Kepariwisata/ Akomodasi	300.000.000
22	PT. Sasando Nusa Korbafo	Perumahan Pondok Indah Sanggaoen	250.000.000
23	CV. New Ricky Hotel	Pembangunan Hotel	700.000.000
24	PT. Protelindo	Jasa Nilai Tambah Teleponi Lainnya, Konstruksi Sentral Telekomunikasi	1.000.000.000
25	PT. Tower Bersama	Menara Telekomunikasi	500.000.000
26	PT. Bali Island Realty	Jasa Akomodasi (Villa)	36.055.000.000
27	CV. Mulia Bungalow	Jasa Akomodasi	1.440.900.000
28	PT. Santic Sari Dewi	Jasa Akomodasi Parawisata	3.000.000.000
29	PT. Alami Sejahtera Nusantara	Perdagangan Besar Gula Lontar	1.440.900.000

30	PT. Dunia Indah Mulia	Penyedia Jasa Akomodasi	700.000.000
31	Hotel Freas	Hotel	400.000.000
32	Hotel Videsy	Hotel	1.500.000.000
33	CV. Bauana Group	Penginapan	2.000.000.000
34	UD. Hebron	Perdagangan Eceran Khusus Barang dan Bangunan, cat dan Kaca	1.500.000.000
35	CV. Tujuh Jaya	Perdagangan Besar Beban Konstruksi , Material Bangunan, Semen, Kapur, Pasir dan Batu	400.000.000
36	CV. Triputra Jaya	Pemasok, PAP, Jasa Konstruksi	300.000.000
37	PT. Nemberala Paradise	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya / Vila	13.688.550.000
38	PT. Rote Roots Bungalows	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya / Vila	12.986.100.000
39	PT. Blue Ocean Adventure	PENYEDIAAN AKOMODASI / Penyedia Jasa penginapan	8.000.000.000
40	PT. Rote Villa Management	PENYEDIAAN AKOMODASI / Menjalankan usaha dibidang Penyedia/jasa akomodasi	588.745.000
41	PT. Outer Island	Vila	1.500.000.000

	Development		
42	CV. Kampung Kakak	Penyediaan Akomodasi Lainnya / vila	1.050.000.000
43	PT. Sanxi Cheng Xie Power Indonesia	Bidang Usaha Pengoperasian dan Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik	15.960.000.000
44	Saindule Poultry Farm – Saindule	Telur Ayam Ras	1.192.000.000
45	PT. Loedi Naia Bros	Jasa Akomodasi (Villa)	5.000.000.000
46	PT. Lontar Mulia Rote	Villa	10.000.000.000
47	PT. Villa Oenggaut	Jasa Akomodasi dan Restaurant	2.390.000.000
48	PT.Mick Place Somewhere Else	Jasa Akomodasi (Villa)	16.186.800.000
49	PT. Coco Matahari Nemberala	Pondok Wisata	2.000.000.000
50	PT.Mitra Graha Tangguh Perkasa	Hotel	88.000.000.000
51	PT. Berkat Pantai Rote	Pondok Wisata	2.500.000.000
52	PT. Limber Rote Wisata	Jasa Akomodasi (Villa)	2.000.000.000
53	PT. PROTELINDO	Tower Telekomunikasi	880.000.000
54	PT. Pachamama Pulau Rote	Pondok Wisata	2.000.000.000
55	PT. Arta Abadi Nusantara	Homestay dan Restourant	700.000.000
56	PT. Surya Energi Indotama	Tower Telekomunikasi	1.500.000.000
57	PT.Tunas Baru Abadi	Industri	1.000.000.000
58	PT. Bukit Berkat Rote Wisata	Angkutan sewa, Villa, restaurant	2.000.000.000
59	PT. Langit Teduh Rote	Restaurant dan	2.000.000.000



		Café	
60	PT.Roda Pembangunan Nusa Tenggara Lekunik Residance (PT. Anak Sulung Mandiri )	Konstruksi & Jasa Leveransir/Pengadaan	1.000.000.000
61	PT. Kelapa Village Sedoen	Real Estate	9.100.000.000
62	PT. Enda Lifu Rote	Hotel Bintang Wisata Selam	1.000.500.000
63	PT. Daya Alam Surya Indonesia	Pembangkitan Tenaga Listrik	228.648.000.000
64	CV. Narrow	Apartemen Hotel	10.000.000.000
65	PT. Gabriel Gabryela Jaya	Konstruksi Bangunan Sipil	1.250.000.000
66	PT. Anugerah Tirta Rote	Wisata Selam	1.000.000.000
67	CV. Anugerah 3.1	Penginapan	4.000.000.000
68	CV. Vicherya Travel	Aktivitas Kurir	16.500.000
69	Villa Sedoen	Villa	5.000.000.000
70	Toko Center	Perdagangan	690.000.000
71	Boa Clif Villas	Villa	15.000.000.000
72	Totem Dream	Akomodasi Lainnya, aktivitas konsultasi manajemen	10.300.000.000
73	PT. Eigerindo Multi Produk Industri	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	213.075.000
74	PT. Timor Nusa Dirgantara	Jasa Penunjang Angkutan Udara	146.029.000
	TOTAL		788.394.339.000

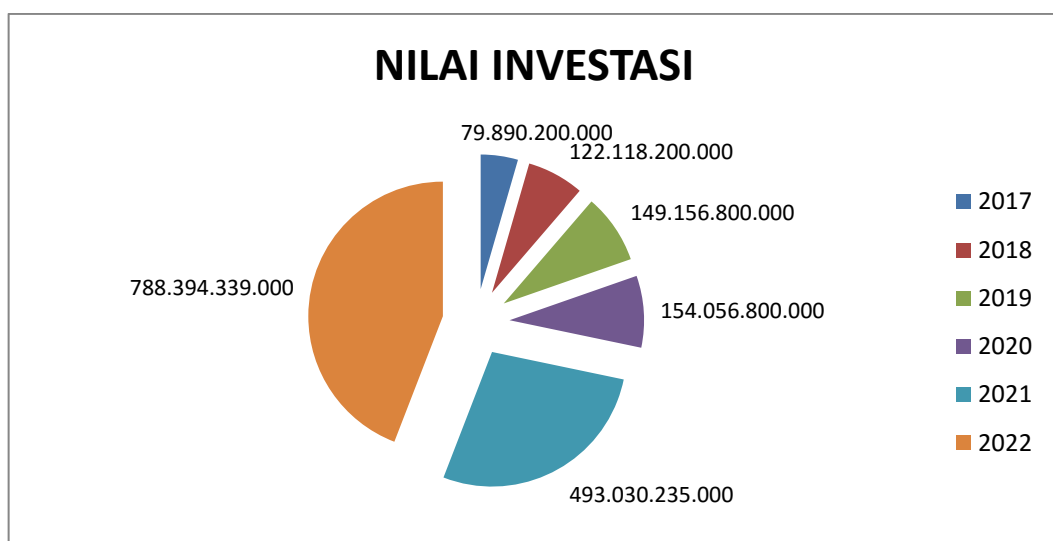
Hasil pengukuran indikator kinerja Jumlah Nilai Investasi berskala nasional (PMDN/PMA) menunjukkan bahwa capaian kinerja Jumlah Nilai Investasi berskala nasional (PMDN/PMA) telah

melampaui target yang ditetapkan. Pada tahun 2022, Nilai Investasi berskala nasional (PMDN/PMA) ditargetkan sebesar Rp.165.000.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 788.394.339.000 dengan capaian kinerja sebesar 477,81%.

Capaian kinerja Jumlah Nilai Investasi berskala nasional (PMDN/PMA) tahun 2022 sebesar 477,81% jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya (tahun 2021) sebesar 308,14%, menunjukkan bahwa capaian tahun 2022 melampaui capaian kinerja tahun sebelumnya dengan peningkatan sebesar 169,67% dan capaian kinerja sebesar 477,81%.

**Gambar 3.4.**

**Tren Jumlah Nilai Investasi berskala nasional (PMDN/PMA)  
Tahun 2016-2021**



Tren realisasi indikator Jumlah Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) selama 6 (Enam) tahun terakhir menunjukkan capaian yang mengalami peningkatan kinerja secara signifikan yakni periode tahun 2016-2022 terus mengalami peningkatan positif setiap tahunnya.

Realisasi Indikator kinerja Jumlah Nilai investasi berskala nasional (PMA/PMDN) Tahun 2022 sebesar Rp. 788.394.339.000 jika

dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024 (sebagai tahun akhir RENSTRA 2019-2024) yaitu sebesar Rp. 175.000.000.000 maka menunjukkan bahwa telah melampaui target kinerja tahun akhir RENSTRA 2019-2024. Sehingga upaya strategis akan terus dilakukan untuk mempertahankan capaian kinerja ini dengan tren yang positif dan optimis dalam melampaui target akhir RENSTRA tahun 2024.

### 3) Realisasi Investasi (PMDN/PMA)

**Tabel 3.7**  
**Total Realisasi Investasi**

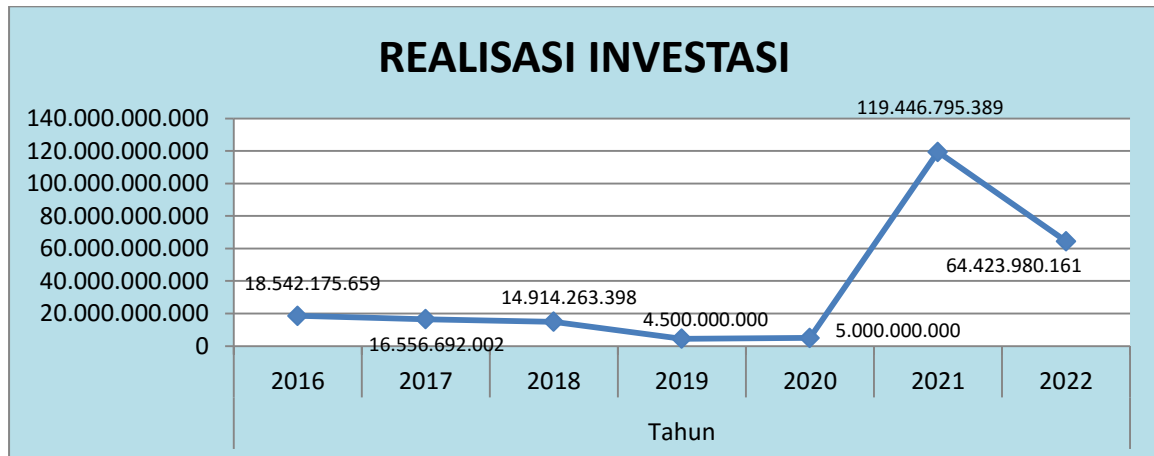
<b>TAHUN</b>	<b>REALISASI</b>
<b>2016</b>	<b>Rp. 18.542.175.659</b>
<b>2017</b>	<b>Rp. 16.556.692.002</b>
<b>2018</b>	<b>Rp. 14.914.263.398</b>
<b>2019</b>	<b>Rp. 4.500.000.000</b>
<b>2020</b>	<b>Rp. 5.000.000.000</b>
<b>2021</b>	<b>RP.119.446.795.389</b>
<b>2022</b>	<b>RP. 64.423.980.161</b>

Hasil pengukuran indikator kinerja Realisasi Investasi (PMDN/PMA) menunjukkan bahwa capaian kinerja Realisasi Investasi (PMDN/PMA) belum mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2022, Realisasi Investasi (PMDN/PMA) ditargetkan sebesar Rp.100.000.000.000 dan terealisasi sebesar Rp.64.423.980.161 dengan capaian kinerja sebesar 64,42%.

Capaian kinerja Realisasi Investasi (PMDN/PMA) tahun 2022 sebesar 64,42% jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya (tahun 2021) sebesar 119,45%, menunjukkan bahwa capaian tahun 2022 tidak melampaui capaian kinerja tahun sebelumnya dengan penurunan sebesar 55,03% dan capaian kinerja sebesar 64,42%.

**Gambar 3.5.**

**Tren Jumlah Realisasi Investasi (PMDN/PMA)  
Tahun 2016-2022**



Tren realisasi indikator Realisasi investasi (PMA/PMDN) selama 6 (Enam) tahun terakhir menunjukkan capaian yang mengalami kinerja yang fluktuatif yakni tahun 2017, 2018, 2019, 2020 menurun namun pada tahun 2021 terjadi peningkatan kinerja secara signifikan.

Realisasi Indikator kinerja Realisasi investasi (PMA/PMDN) Tahun 2022 sebesar Rp. 64.423.980.161 jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024 sebesar Rp. 110.000.000.000 maka menunjukkan bahwa belum mencapai target kinerja tahun akhir RENSTRA 2019-2024 dengan capaian kinerja sebesar 64,42% dari target tahun akhir RENSTRA 2019-2024, Sehingga upaya strategis akan terus dilakukan untuk mencapai capaian kinerja ini dengan tren yang positif dan optimis untuk mencapai target akhir RENSTRA tahun 2024.

Berdasarkan pengukuran kinerja dan uraian penjelasan diatas, disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Investasi** Tahun Anggaran 2022 sebesar **215,98%** atau dikategorikan **“Sangat Tinggi”**.

Keberhasilan atas pencapaian kinerja sasaran ini sangat dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Adanya dukungan dari Pemerintah melalui pemberian Dana Alokasi Khusus Non Fisik dari Pemerintah Pusat (BKMPM RI) untuk Fasilitasi Penanaman Modal
- 2) Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Online Sistem Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal sehingga adanya peningkatan pemahaman para pelaku usaha mengenai system pelaporan LKPM berbasis NIB
- 3) Melakukan Pemantauan dan Pengawasan dalam melaksanakan kewajiban LKPM
- 4) Koordinasi terkait Perizinan dan Penanaman Modal ke DPMPSTP Propinsi NTT

Meskipun terdapat faktor-faktor pendukung keberhasilan diatas, pencapaian kinerja sasaran masih menghadapi hambatan dan kendala antara lain:

- 1) Belum optimalnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal;
- 2) Masih terbatasnya SDM aparatur yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang menguasai informasi dan teknologi, sistim aplikasi pelayanan perizinan, *Online Single Submission* (OSS) serta operator SIPID, SPIPISE dan lain sebagainya;
- 3) Belum optimalnya pemahaman Pelaku usaha terkait pemanfaatan Sistem aplikasi *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA)

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran ini kedepan maka akan ditempuh langkah - langkah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam urusan Penanaman modal;
- 2) Peningkatan kualitas Sumberdaya Aparatur yang menguasai informasi

dan teknologi, sistim aplikasi pelayanan perizinan, *Online Single Submission* (OSS) serta operator SIPID, SPIPISE dan lain sebagainya;

- 3) Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Online Sistem Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal sehingga adanya peningkatan pemahaman para pelaku usaha mengenai system pelaporan LKPM berbasis NIB

Program yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini adalah Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, yang dilaksanakan melalui Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, meliputi Sub Kegiatan :

1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 208.214.000,- ( Dua Ratus Delapan Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) terealisasi sebesar Rp.201.465.973,- (Dua Ratus Satu Juta *Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*) atau sebesar 96,76%.
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 180.440.000,- ( Seratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) terealisasi sebesar Rp.173.005.000,- (Seratus Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu *Rupiah*) atau sebesar 95,88%.

Efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya melalui pelaksanaan program dan alokasi anggaran tahun 2023 terhadap pencapaian kinerja sasaran ini dapat digambarkan dengan pengukuran besaran efisiensi anggaran dan rasio capaian kinerja terhadap realisasi anggaran tahun 2023 sebagai berikut:

**Tabel 3.8**  
**Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Pencapaian Kinerja Sasaran**  
**Meningkatnya Investasi**

Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran Program Pendukung (%)	Tingkat Efisiensi		Tingkat Efektifitas	
		Efisiensi Anggaran (%)	Kategori	Rasio Capaian Kinerja Terhadap Anggaran	Kategori
(1)	(2)	(3) = 100 - (2)	(4)	(5) = (1)/(2)	(6)
215,98	96,35	3,65	Efisien	2,24	Efektif

Tampilan tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi anggaran program pendukung capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Investasi** mencapai tingkat efisiensi sebesar 2,24% atau dikategorikan Efisien. Selain itu, rasio capaian kinerja sasaran terhadap realisasi anggaran program pendukung menunjukkan tingkat efektifitas berada pada nilai rasio >1 sehingga dikategorikan Efektif.

<b>SASARAN 3</b>
<b>Meningkatnya Pelayanan Perizinan</b>

Pelayanan perizinan adalah proses pemberian izin kepada orang/badan hukum untuk melakukan aktivitas usaha dan/kegiatan bukan usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “**MENINGKATNYA PELAYANAN PERIZINAN**” dengan 1 (satu) indikator yaitu :

**1. Persentase Bangunan/Usaha Berijin**

Penjelasan atas capaian indikator kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut: Realisasi bangunan / usaha berijin

$$\text{Target bangunan / usaha berijin} \times 100$$

Maka jumlah Realisasi bangunan usaha berijin tahun 2022 sebanyak 687 dan Target bangunan usaha berijin sebanyak 662 sehingga  $687/662 \times 100 = 104\%$

**Tabel 3.9.**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran**  
**Meningkatnya Pelayanan Perizinan**

PENGUKURAN									
No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021	Tahun 2022			Target Akhir RESNTRA 2024	% realisasi 2022 terhadap tahun 2021	% realisasi 2022 terhadap Target Akhir RESNTRA 2024
				Target	Realisasi	% Capaian			
1.	Meningkatnya Pelayanan Perizinan	%	115,87	70	104,00	148,57	90	89,76	115,56
Rata-Rata Capaian Kinerja						148,57	Sangat Tinggi		

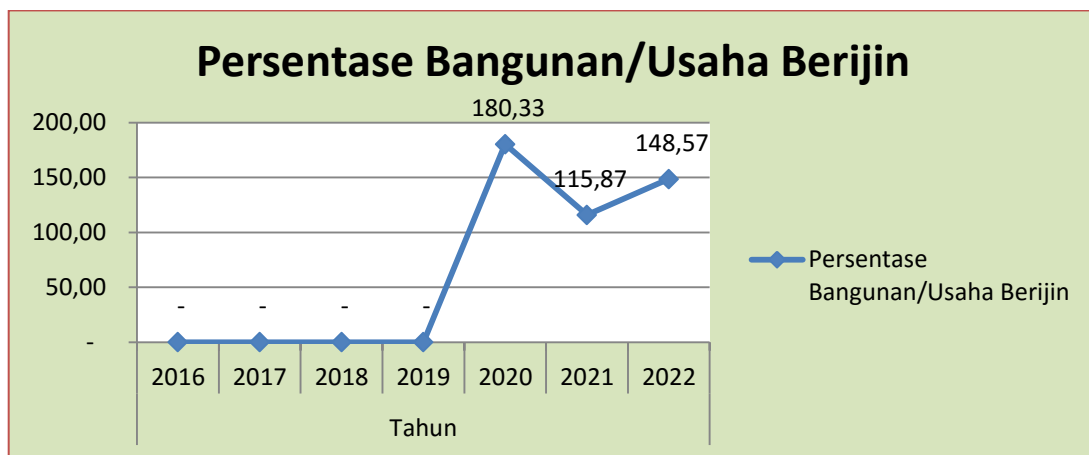
Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi Indikator Persentase Bangunan/Usaha Berijin sebesar 104%, sehingga disimpulkan bahwa Indikator Persentase Bangunan/Usaha Berijin sebesar 104%.

Hasil pengukuran indikator kinerja Persentase Bangunan/Usaha Berijin menunjukkan bahwa capaian kinerja Persentase Bangunan/Usaha Berijin telah melampaui target yang ditetapkan. Pada tahun 2021, Persentase Bangunan/Usaha Berijin ditargetkan sebesar 70% dan terealisasi sebesar 104% dengan capaian kinerja sebesar 148,57%.

Capaian kinerja Persentase Bangunan/Usaha Berijin tahun 2022 sebesar 148,57% jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya (tahun 2021) sebesar 115,87%, menunjukkan bahwa capaian tahun 2022 telah melampaui capaian kinerja tahun sebelumnya dengan peningkatan sebesar 32,70% dan capaian kinerja sebesar 148,57%.



**Gambar 3.6.**  
**Tren Peresentase Bangunan/Usaha Berijin**  
**Tahun 2020-2022**



Tren realisasi indikator kinerja Persentase bangunan /usaha berijin selama 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan capaian yang mengalami penurunan kinerja yakni dari tahun 2020 ke tahun 2021 sebesar 115,87% dan mengalami peningkatan lagi pada tahun 2022 sebesar 148,57 %.

Realisasi indikator Persentase bangunan /usaha berijin tahun 2022 sebesar 104 % jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024 (sebagai tahun akhir RENSTRA 2019-2024) yaitu sebesar 90%, menunjukkan bahwa target akhir RENSTRA telah melampaui target sebesar 14%, namun upaya strategis akan terus dilakukan untuk mempertahankan target akhir RENSTRA tahun 2024.

Berdasarkan pengukuran kinerja dan uraian penjelasan diatas, disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran **Persentase Bangunan/Usaha Berijin** Tahun Anggaran 2022 sebesar **148,57%** atau dikategorikan **“Sangat Tinggi”**.

Keberhasilan atas pencapaian kinerja sasaran ini sangat dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya-upaya perbaikan dan inovasi dari segala aspek secara terus menerus dalam rangka pendataan dan penertiban Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Rote Ndao

- 2) Adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Rote Ndao melalui ketersediaan anggaran untuk pendataan dan penertiban perizinan dan non perizinan di Kabupaten Rote Ndao

Meskipun terdapat faktor-faktor pendukung keberhasilan diatas, pencapaian kinerja sasaran masih menghadapi hambatan dan kendala antara lain:

- 1) Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya memiliki ijin berusaha
- 2) Belum optimalnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran ini kedepan maka akan ditempuh langkah - langkah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya memiliki ijin berusaha
- 2) Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam urusan Perizinan dan Penanaman modal;

Program yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini adalah Program Pelayanan Penanaman Modal, yang dilaksanakan melalui kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, meliputi Sub Kegiatan Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan Non Perizinan penanaman modal, dengan dukungan anggaran sebesar Rp.153.998.530,- (*Seratus Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Rupiah*) terealisasi sebesar Rp.152.628.423,- (*Seratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah*) atau sebesar 99,11%.

Efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya melalui pelaksanaan program dan alokasi anggaran tahun 2022 terhadap pencapaian kinerja sasaran ini dapat digambarkan dengan pengukuran besaran efisiensi anggaran dan rasio capaian kinerja terhadap realisasi anggaran tahun 2022 sebagai berikut:

**Tabel 3.10.**  
**Tingkat Efisiensi Pencapaian Kinerja Sasaran**  
**Meningkatnya Pelayanan Perizinan**

Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran Program Pendukung (%)	Tingkat Efisiensi		Tingkat Efektifitas	
		Efisiensi Anggaran (%)	Kategori	Rasio Capaian Kinerja Terhadap Anggaran	Kategori
(1)	(2)	(3) = 100 – (2)	(4)	(5) = (1)/(2)	(6)
148,57	99,11	0,89	Efisien	1,50	Efektif

Tampilan tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi anggaran program pendukung capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Transparansi dan Responsibilitas Pelayanan Publik** mencapai tingkat efisiensi sebesar 0,89% atau dikategorikan Efisien. Selain itu, rasio capaian kinerja sasaran terhadap realisasi anggaran program pendukung menunjukkan tingkat efektifitas berada pada nilai rasio >1 sehingga dikategorikan Efektif.

#### **D. Kinerja Keuangan**

Manajemen pembangunan berbasis kinerja dimaksudkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber dana/anggaran merupakan alat yang dipakai untuk mencapai perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, alokasi belanja diupayakan agar efisien, efektif dan proporsional. Belanja dikelompokkan ke dalam Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung yang masing-masing mempunyai fungsi untuk

meningkatkan pelayanan baik untuk aparaturnya maupun pelayanan kepada masyarakat.

Pengelolaan Anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao pada Tahun Anggaran 2022 dilakukan untuk mencapai efektivitas pengelolaan belanja yang dijabarkan melalui target dan realisasinya maupun dari efisiensi dan efektivitas anggaran melalui belanja tidak langsung dan belanja langsung sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### 1. Realisasi Anggaran

Adapun realisasi keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao pada Tahun Anggaran 2022 bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2022 dengan rinciannya sebagai berikut:

**Tabel 3.11.**  
**Realisasi Keuangan**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Kabupaten Rote Ndao**  
**Tahun Anggaran 2022**

No	Uraian		Pagu Anggaran	Realisasi	
			(Rp)	Jumlah	%
1.	<b>BELANJA OPERASI</b>		<b>2.675.661.629</b>	<b>2.624.304.162</b>	<b>98,08</b>
	1.1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>2.093.009.099</b>	<b>2.057.204.766</b>	<b>98,29</b>
	1.1.1	KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	<b>51.200.000</b>	<b>51.135.000</b>	<b>98,87</b>
	1.1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38.200.000	38.160.000	99,90
	1.1.1.2	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.000.000	12.975.000	99,81
	1.1.2	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	<b>1.759.556.899</b>	<b>1.738.401.733</b>	<b>98,80</b>
	1.1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.699.275.899	1.678.120.733	98,76
	1.1.2.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	60.281.000	60.281.000	100
	1.1.3	KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	<b>4.200.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>100,00</b>
	1.1.3.1	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4.200.000	4.200.000	100,00
	1.1.4	KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	<b>75.000.000</b>	<b>71.250.000</b>	<b>95</b>

		1.1.4.1	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	75.000.000	71.250.000	95
		1.1.5	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	<b>94.432.000</b>	<b>94.431.139</b>	<b>99,99</b>
		1.1.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	100,00
		1.1.5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.435.000	7.435.000	100
		1.1.5.3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.700.000	5.700.000	100
		1.1.5.4	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80.797.000	80.796.139	99,99
		1.1.6	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	<b>27.482.500</b>	<b>18.555.194</b>	<b>67,52</b>
		1.1.6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	988.000	98,80
		1.1.6.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.482.500	17.567.194	66,34
		1.1.7	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	<b>81.137.700</b>	<b>79.231.700</b>	<b>97,65</b>
		1.1.7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	51.138.700	49.232.700	96,27
		1.1.7.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.999.000	29.999.000	100
	<b>1.2</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>		<b>40.000.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>100</b>
		1.2.1	KEGIATAN PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	40.000.000	40.000.000	100
		1.2.1.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	40.000.000	40.000.000	100
	<b>1.3</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>		<b>153.998.530</b>	<b>152.628.423</b>	<b>99,11</b>
		1.3.1	KEGIATAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	153.998.530	152.628.423	99,11

		1.3.1.1	Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	153.998.530	152.628.423	99,11
<b>1.4</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>			<b>388.654.000</b>	<b>374.470.973</b>	<b>96,35</b>
	1.4.1	KEGIATAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		<b>388.654.000</b>	<b>374.470.973</b>	<b>96,35</b>
		1.4.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	208.214.000	201.465.973	96,76
		1.4.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	180.440.000	173.005.000	95,88
<b>TOTAL</b>				<b>2.675.661.629</b>	<b>2.624.304.162</b>	<b>98,08</b>

Sumber : Laporan Keuangan DPMPTSP Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2022

Berdasarkan tampilan tabel diatas menunjukkan bahwa secara umum pengelolaan keuangan Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2022 mendapat alokasi anggaran untuk pembiayaan 4 program, 10 kegiatan, dan 18 sub kegiatan sebesar Rp.2.675.661.629,- (Dua miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah) realisasi sebesar Rp. 2.624.304.162,- (Dua miliar enam ratus dua puluh empat juta tiga ratus empat ribu seratus Enam puluh dua rupiah) atau 98,08% dengan rincian terdiri dari:

1. Belanja Operasi pagu anggaran sebesar Rp. 2.675.661.629,- realisasi sebesar Rp. 2.624.304.162,- atau 98,08%
2. Belanja Modal (Tidak ada)
3. Belanja Tidak terduga (Tidak ada)
4. Belanja Transfer (Tidak ada)

## **2. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran Terhadap Pencapaian Indikator Kinerja.**

Adapun gambaran efisiensi dan efektifitas anggaran dalam pencapaian indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.12.**  
**Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Indikator Kinerja**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2022**

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Indikator (%)	Capaian Kinerja Sasaran (%)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung	Total Anggaran			Tingkat Efisiensi Kinerja			Tingkat Efektifitas Kinerja	
					Pagu (Rp)	Realisasi		Tingkat Efisiensi Kinerja		Kategori	Rasio % Capaian Kinerja Terhadap % Realisasi Keuangan	Kategori
						Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 6 - 7	10	11	12 = 4 / 8	13
Meningkatnya Akuntabilitas Transparansi dan Responsibilitas Pelayanan Publik	1. Indeks Kepuasan Pelayanan Publik	112,76	112,76	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL/KEGIATAN Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	153.998.530	152.628.423,00	99,11	1.370.107	0,89	Efisien	1,14	Efektif
Meningkatnya Pelayanan Perizinan	2. Persentase Bangunan/ Usaha Berijin	148,57	148,57									
Meningkannya Investasi	1. Meningkatnya Investasi berskala nasional	105,71	215,98	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL/Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota/Sub Kegiatan : 1) koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal 2) Koordinasi dan sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	388.654.000	374.470.973	96,35	14.183.027	3,65	Efisien	2,24	Efektif
	2. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	477,81										
	3. Realisasi Investasi (PMDN/PMA)	64,42										
Kinerja Penunjang Lainnya		-	-	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Lainnya	2.133.009.099	2.097.204.766	98,32	35.804.333	1,68	Efisien		
Rata-Rata Capaian Kinerja		181,86	159,11	Total Anggaran	2.675.661.629	2.624.304.162	98,08	51.357.467	1,92	EFISIEN	1,85	EFEKTIF



Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa total anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 dalam mendukung pencapaian indikator kinerja sebesar Rp.2.675.661.629,- (Dua miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah) realisasi sebesar Rp. 2.624.304.162,- (Dua miliar enam ratus dua puluh empat juta tiga ratus empat ribu seratus Enam puluh dua rupiah) atau 98,08% dengan rincian terdiri dari:

Hal tersebut menunjukan bahwa terdapat efisiensi anggaran belanja dalam pencapaian indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 sebesar Rp.51.357.467,- (*Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah*) dengan tingkat efisiensi sebesar 1,92% atau dikategorikan **Efisien**. Selain itu, dengan rasio rata-rata capaian indikator kinerja (181,86%) terhadap realisasi anggaran (98,08i%) menunjukkan tingkat efektifitas dalam pencapaian indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 sebesar 1,85 atau berada pada nilai rasio >1 sehingga dikategorikan **Efektif**.

## BAB IV P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao sebagai media untuk menjawab amanah yang diberikan oleh *stakeholders* kepada Pemerintah pada dasarnya adalah menyajikan kinerja tahunan dalam periode perencanaan strategik (Renstra) yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja ini menggambarkan keberhasilan dan kegagalan pemerintah dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao dalam pencapaian sasaran-sasaran yang telah disajikan dalam Rencana Kinerja (Renja) yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategi (Renstra).

Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2022 yang terdiri dari 3 (tiga) sasaran dengan 5 (Lima) indikator kinerja menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja sebesar **181,86%** atau dikategorikan **“Sangat Tinggi”**, dengan rata-rata capaian kinerja Sasaran **Meningkatnya transparansi dan responsibilitas Pelayanan Publik** sebesar 112,76% (*Sangat Tinggi*), rata-rata capaian kinerja **Sasaran Meningkatkan Investasi** sebesar 215,98% (*Sangat Tinggi*) dan rata-rata capaian kinerja **Sasaran Meningkatkan Pelayan Perizinan** sebesar 148,57% (*Sangat Tinggi*). Meskipun demikian masih terdapat berbagai hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mewujudkan capaian tersebut namun langkah optimalisasi sumberdaya dilaksanakan sehingga proses pelaksanaan program dan kegiatan benar-benar berhasil sesuai dengan apa yang telah ditargetkan.

Pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao senantiasa diupayakan untuk ditingkatkan terus menerus pada tahun-tahun yang akan datang serta diupayakan agar setiap aspirasi masyarakat dan kepentingannya dapat terus terakomodasikan dalam APBD Kabupaten Rote Ndao setiap tahun, dimana APBD itu adalah merupakan kristalisasi dari prioritas-prioritas dan pencapaian-pencapaian yang harus diwujudkan setiap tahunnya.

Ba'a, 19 Januari 2023


Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Rote Ndao



**Daud D. Bessie, S.Pd**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196908111998011002

## **LAMPIRAN - LAMPIRAN**

**LEMBARAN VERIFIKASI LEVEL I LKIP 2022**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

NO	REVIEWER	CATATAN/KOREKSI	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	Fungsional	1.1. Verifikasi data capaian dan kendala pencapaian indikator, PK 2022	
2	Koordinator Bidang	2.1. Data Indikator Kinerja Perbidang	
3	Sekretaris	3.1. Data Gambaran Perangkat Daerah dan Sumber Daya diupdate	
4	Kepala Dinas/ Badan/ Ktr Bagian	4.1 Final Reviu, Indikator Capaian dan penyebab target tidak tercapai	

Ba'a, 16 Januari 2022

**PIHAK PERTAMA**  
KEPALA DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU  
KABUPATEN ROTE NDAO



**DAUD DANIEL BESSIE, S.PD**  
NIP. 196908111998011002



**PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Kompleks Perkantoran Bumi Tii Langga Permai  
Jl. Lekunik Telepon/Faximile (0380) 8571005 Ba'a

Website : [www.rotendaokab.go.id](http://www.rotendaokab.go.id)

**RENCANA KINERJA TAHUNAN**

PERANGKAT DAERAH : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROTE NDAO  
TAHUN ANGGARAN : 2022

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	2	3	4
1	Meningkatnya Transparansi dan Responsibilitas Pelayanan Publik	1.1. Indeks Kepuasan Masyarakat	80 Poin
2	Meningkatnya Investasi	2.1. Meningkatnya Investasi berskala nasional	70 PMA/PMDN
		2.2. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	165.000.000.000
		2.3. Realisasi investasi PMDN/PMA	100.000.000.000
3	Meningkatnya Pelayanan Perizinan	3.1. Persentase Bangunan/Usaha Berijin	70 %

Ba'a, 17 Januari 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU KABUPATEN ROTE NDAO,



DAUD DANIEL BESSIE, S.Pd  
NIP. 19690811 199801 1 002



## BUPATI ROTE NDAO

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Daud Daniel Bessie, S.Pd

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao

Selanjutnya di sebut PIHAK PERTAMA

Nama : Paulina Haning-Bullu, SE

Jabatan : Bupati Rote Ndao

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ba'a, 12 November 2022

PIHAK KEDUA

BUPATI ROTE NDAO,  
  
PAULINA HANING-BULLU, SE

PIHAK PERTAMA  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU KABUPATEN ROTE NDAO,  
  
DAUD DANIEL BESSIE, S.Pd  
NIP. 19690811 199801 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN ROTE NDAO

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	2	3	4
1	Meningkatnya Transparansi dan Responsibilitas Pelayanan Publik	1.1. Indeks Kepuasan Pelayanan Publik	80 Poin
2	Meningkatnya Investasi	2.1. Meningkatnya investasi berskala nasional	70 PMA/PMDN
		2.2. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	165.000.000.000
		2.3. Realisasi investasi PMDN/PMA	100.000.000.000
3	Meningkatnya Pelayanan Perizinan	3.1 Persentase Bangunan/Usaha Berijin	70 %
PROGRAM			ANGGARAN
1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		Rp.	388.654.000,-
2. Promosi Penanaman Modal		Rp.	40.000.000,-
3. Pelayanan Penanaman Modal		Rp.	153.998.530,-
4. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Rp.	2.093.009.099,-
Jumlah		Rp.	2.675.661.629,-

Ba’a, 12 November 2022



PIHAK KEDUA

BUPATI ROTE NDAO,




PAULINA HA NING-BULLU, SE

PIHAK PERTAMA  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU KABUPATEN ROTE NDAO,

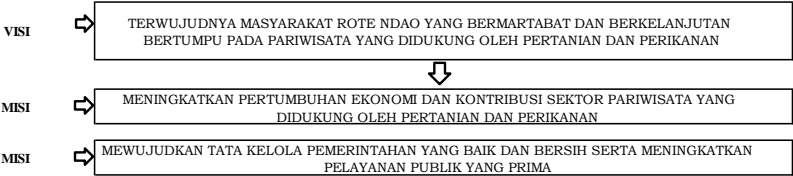



DAUD DNIEL BESSIE, S.Pd  
NIP. 19690811 199801 1 002





DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN ROTE NDAO  
POHON KINERJA TAHUN 2022



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
SASARAN STRATEGIS	
1	Meningkatnya Transparansi dan Responsibilitas Pelayanan Publik
2	Meningkatnya Investasi
3	Meningkatnya Pelayanan Perizinan
INDIKATOR KINERJA	
1	Indeks Kepuasan Pelayanan Publik
2	Meningkatnya Investasi berskala nasional
3	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (x1.000.000)
4	Realisasi Investasi PMDN / PMA
5	Persentase Bangunan / Usaha berizin

SEKRETARIS	
SASARAN STRATEGIS	
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran
INDIKATOR KINERJA	
1	Persentase Surat Menyurat yang diselesaikan
2	Jumlah Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Tenaga
3	Jumlah Pengelolaan Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah
4	Jumlah Pengelolaan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah
5	Jumlah Penyusunan Laporan Evaluasi Pertanggungjawaban
6	Jumlah Penyusunan Revisi Renstra , Renja -PD, Revisi Renja PD, Profil OPD, RKT, Perjanjian Kinerja, Revisi PK, Rencana Aksi Kinerja
7	Jumlah Penyusunan RKA-PD, Revisi RKA-PD, DPA OPD dan Revisi DPA - OPD
8	Jumlah Penyusunan LKIP, LKPJ, LPPD dan Evaluasi Renja
9	Jumlah Penyusunan Dokumen LKPD, Neraca dan Calk
10	Jumlah Penyusunan LHP

KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
SASARAN STRATEGIS	
1.	Meningkatkan Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Umum
INDIKATOR KINERJA	
1	Persentase Surat Menyurat yang diselesaikan
2	Jumlah Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Tenaga Kontrak Daerah
3	Jumlah Pengelolaan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah
4	Jumlah Penyusunan Laporan Evaluasi Pertanggungjawaban

PERENCANA AHLI MUDA (SUB KOORDINATOR SUBSTANSI PERENCANAAN,EVALUASI DAN PELAPORAN)	
SASARAN STRATEGIS	
1.	Meningkatkan Administrasi Perencanaan dan Pelaporan
INDIKATOR KINERJA	
1	Jumlah Penyusunan Revisi Renstra , Renja -PD, Revisi Renja PD, Profil OPD, RKT, Perjanjian Kinerja, Revisi PK, Rencana Aksi Kinerja
2	Jumlah Penyusunan RKA-PD, Revisi RKA-PD, DPA OPD dan Revisi DPA - OPD
3	Jumlah Penyusunan LKIP, LKPJ, LPPD dan Evaluasi Renja

ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (SUB KOORDINATOR SUBSTANSI KEUANGAN DAN ASET	
SASARAN STRATEGIS	
1.	Meningkatkan Administrasi Keuangan
INDIKATOR KINERJA	
1	Jumlah Pengelolaan Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah
2	Jumlah Penyusunan Dokumen LKPD, Neraca dan Calk
3	Jumlah Penyusunan LHP

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA	
SASARAN STRATEGIS	
1	Meningkatnya Investasi
INDIKATOR KINERJA	
1	Jumlah Pendataan Komoditi Unggulan Daerah Berpeluang Investasi
2	Jumlah Pendataan UKM Potensial Berpeluang
3	Jumlah promosi investasi melalui buku profil <del>potensi dan peluang investasi daerah</del>
4	Jumlah Promosi melalui Keikutsertaan dalam Pameran Investasi

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (SUB KOORDINATOR SUBSTANSI PROMOSI PENANAMAN MODAL)	
SASARAN STRATEGIS	
1	Meningkatnya Investasi
INDIKATOR KINERJA	
1	Jumlah promosi investasi melalui buku profil <del>potensi dan peluang investasi daerah</del>
2	Jumlah Promosi melalui Keikutsertaan dalam Pameran Investasi

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (SUB KOORDINATOR SUBSTANSI PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL)	
SASARAN STRATEGIS	
1	Meningkatnya Investasi
INDIKATOR KINERJA	
1	Jumlah Pendataan Komoditi Unggulan Daerah Berpeluang Investasi
2	Jumlah Pendataan UKM Potensial Berpeluang Investasi

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA	
SASARAN STRATEGIS	
1	Meningkatnya Investasi
INDIKATOR KINERJA	
1	Jumlah Perjanjian Kerjasama antara PMA/PMDN dengan UMKM;
2	Jumlah Perjanjian Kerjasama antara DPMP TSP Kab. Rote Ndao dengan BUMN / BUMD

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (SUB KOORDINATOR SUBSTANSI FASILITASI KEMITRAAN DUNIA USAHA)	
SASARAN STRATEGIS	
1.	Meningkatnya Investasi
INDIKATOR KINERJA	
1	Jumlah Perjanjian Kerjasama antara PMA/PMDN dengan UMKM;
2	Jumlah Perjanjian Kerjasama antara DPMP TSP Kab. Rote Ndao dengan BUMN / BUMD

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA	
SASARAN STRATEGIS	
1	Meningkatnya Investasi
INDIKATOR KINERJA	
1	Jumlah Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
2	Jumlah Penyelesaian Masalah Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal secara Online
3	Jumlah Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
4	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penanaman Modal
5	Jumlah Penyelesaian Masalah Perizinan dan Perizinan Berusaha

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (SUB KOORDINATOR SUBSTANSI EVALUASI DAN PELAPORAN)	
SASARAN STRATEGIS	
1	Meningkatnya Investasi

INDIKATOR KINERJA	
1	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penanaman Modal
2	Jumlah Penyelesaian Masalah Perizinan dan Perizinan Berusaha

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (SUB KOORDINATOR SUBSTANSI PEMANTAUAN DAN PEMBINAAN)	
SASARAN STRATEGIS	
1	Meningkatnya Investasi

INDIKATOR KINERJA

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA	
SASARAN STRATEGIS	
1	Meningkatnya Pelayanan Perizinan
2	Meningkatnya Transparansi dan Responsibilitas Pelayanan Publik
INDIKATOR KINERJA	
1	Jumlah pendataan dan penertiban perizinan dan non perizinan
2	Jumlah monitoring teknis pendataan dan Penertiban perizinan dan non perizinan
3	Jumlah dokumen perizinan yang diterbitkan
4	Jumlah dokumen non perizinan yang diterbitkan
5	Jumlah pengelolaan pelayanan perizinan dan non perizinan secara Online
6	Jumlah fasilitasi Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha di kabupaten Rote Ndao
7	Jumlah penanganan pengaduan masyarakat
8	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (SUB KOORDINATOR SUBSTANSI PELAYANAN PERIZINAN)	
--	--

SASARAN STRATEGIS	
1	Meningkatnya Pelayanan Perizinan
INDIKATOR KINERJA	
1	Jumlah Pendataan dan Penertiban Perizinan
2	Jumlah Monitoring Pendataan dan Penertiban Perizinan

3	Jumlah pengelolaan pelayanan perizinan dan non perizinan secara Online
4	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Perizinan secara Online
5	Jumlah fasilitasi Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha di kabupaten Rote Ndao


ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (SUB KOORDINATOR SUBSTANSI PELAYANAN NON PERIZINAN)	
--	--

SASARAN STRATEGIS	
1.	Meningkatnya Pelayanan Perizinan

1	Jumlah Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
2	Jumlah Penyelesaian Masalah Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal secara
3	Jumlah Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

INDIKATOR KINERJA	
1	Jumlah Pendataan dan Penertiban Non Perizinan
2	Jumlah Monitoring Pendataan dan Penertiban Non Perizinan
3	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Non Perizinan secara Online
4	Jumlah Dokumen Non Perijinan yang diterbitkan

- ANALIS KEBLIJAKAN AHLI MUDA (SUB KOORDINATOR SUBSTANSI INFORMASI DAN PELAYANAN PENGADUAN)
- SASARAN STRATEGIS
1. Meningkatnya Transparansi dan Responsibilitas Pelayanan Publik
- INDIKATOR KINERJA
- 1 Jumlah penanganan pengaduan masyarakat
- 2 Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Kabupaten Rote Ndao,  
  
DABUS D.

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Program	Anggaran	Tahapan Pelaksanaan	Jadwal Pelaksanaan Per-Triwulan				Penanggung jawab
							I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Transparansi dan Responsibilitas Pelayanan Publik	1.1. Indeks Kepuasan Masyarakat	80 Poin	1. Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 153.998.530	Perencanaan, Pelaksanaan, Monev dan Tindak Lanjut					Bidang Perijinan Terpadu
2	Meningkatnya Pelayanan Perijinan	2.1. Persentase Bangunan/Usaha Berizin	70 %			Perencanaan, Pelaksanaan, Monev dan Tindak Lanjut	√	√	√	√	Bidang Perijinan Terpadu
3	Meningkatnya Investasi	3.1. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	70 PMA/PMDN	2. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 392.223.000	Perencanaan, Pelaksanaan, Monev dan Tindak Lanjut	√	√	√	√	Bidang Pengawasan dan Pengendalian
		3.2. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	165.000.000.000								
		3.3. Realisasi investasi (PMDN/PMA)	100.000.000.000								
Kinerja Penunjang Lainnya				3. Promosi Penanaman Modal	Rp. 40.000.000	Perencanaan, Pelaksanaan, Monev dan Tindak Lanjut	√	√	√	√	Bidang Promosi dan Penanaman Modal
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					Rp. 1.986.011.099	Perencanaan, Pelaksanaan, Monev dan Tindak Lanjut	√	√	√	√	Sekretariat

Ba'a, 20 Januari 2022  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao,  
  
**DANIEL BESSIE, S.Pd**  
NP. 19690811 199801 1 002

**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2019-2024  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN ROTE NDAO**

**NAMA PD** : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
**VISI** : Terwujudnya masyarakat Rote Ndao yang BERMARTABAT secara BERKELANJUTAN bertumpu pada pariwisata yang didukung oleh pertanian dan perikanan  
**MISI** : "Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi Sektor Pariwisata yang didukung oleh Pertanian dan Perikanan"  
 : "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima"  
**TUGAS POKOK** : Membantu Bupati dalam menyusun dan melaksanakan urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
**ISU STRATEGIS** : Meningkatkan minat investor untuk berinvestasi  
 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN/FORMULA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Transparansi dan Responsibilitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Pelayanan Publik	Poin	Rata-rata Skor Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Unit Pelayanan Publik Yang Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat	DPMPTSP	DPMPTSP
2	Meningkatnya Investasi	Meningkatnya Investasi berskala nasional	PMDN/PMA	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	DPMPTSP	DPMPTSP
		Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rupiah	Jumlah nilai realisasi berskala nasional (PMDN/PMA)	DPMPTSP	DPMPTSP
		Realisasi Investasi PMDN/PMA	Rupiah	Jumlah nilai realisasi investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	DPMPTSP	DPMPTSP
3	Meningkatnya Pelayanan Perizinan	Persentase Bangunan/Usaha Berijin (%)	%	Realisasi bangunan / usaha berijin / Target bangunan / usaha berijin x 100	DPMPTSP	DPMPTSP

Baa, 20 Januari 2022  
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Kabupaten Rote Ndao  
  
 Daniel Bessie, S.Pd  
 Pembina Utama Muda  
 NIP.196908111998011002





**PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Nomor SOP-AP	DPMPTSP. 065/19/XI/ KAB -RN/2019
Tanggal Pengesahan	11 November 2019
Tanggal Revisi	
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao,  <b>U. S. Benay Forah</b> NIP. 196801211994031015
Nama SOP- AP	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

<b>Dasar Hukum :</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana :</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;</li> <li>2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, laporan Kinerja, dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;</li> <li>3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;</li> <li>4. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rote Ndao;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan Minimal S1</li> <li>2. Memahami sistematika penyusunan laporan kinerja</li> <li>3. Memahami Tata Naskah Dinas</li> </ol>
<b>Keterkaitan :</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan :</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)</li> <li>2. SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK)</li> <li>3. SOP Penanganan Surat Masuk</li> <li>4. SOP Penanganan Surat Keluar</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer</li> <li>2. ATK</li> <li>3. Jaringan Internet</li> <li>4. Lembar Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Laporan Realisasi Keuangan</li> </ol>
<b>Peringatan :</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan :</b>
Apabila Penyusunan LKIP tidak tepat waktu maka akan berpengaruh pada penyusunan LKIP Pemerintah Kabupaten Rote Ndao pada Perangkat Daerah terkait	Disimpan dalam bentuk Sofcopy dan Hardcopy

No.	Tahap Kegiatan	Pelaksanaan				Mutu Baku			Keterangan
		Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Sekretaris	Kepala DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menugaskan Analis untuk mengumpulkan bahan kelengkapan Penyusunan LKIP Dinas	Mulai				Agenda Kerja	15 menit	Disposisi	
2.	Mengumpulkan data-data Realisasi Program Anggaran dari masing-masing Bidang dan menyerahkan ke Kasubag					Disposisi	15 menit	Disposisi	
3.	Membuat konsep Laporan LKIP Dinas kemudian menyerahkan kepada Sekretaris					Disposisi	3 hari	Konsep laporan LKIP	
4.	Memeriksa Draf laporan LKIP jika setuju diparaf dan disampaikan ke Kadis jika tidak setuju dikembalikan untuk diperbaiki					Konsep laporan LKIP	3 jam	Konsep laporan LKIP	
5.	Memeriksa Draf laporan LKIP jika setuju ditandatangani dan diteruskan ke Analis Perencanaan dan Pelaporan untuk ditindaklanjuti jika tidak setuju dikembalikan untuk diperbaiki					Konsep laporan LKIP	30 menit	Laporan LKIP	
6.	Mengagendakan LKIP, menggandakan dan Mendistribusi		Selesai			Laporan LKIP	20 menit	Laporan LKIP	



**PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Kompleks Perkantoran Bumi Tii Langga Permai  
Jl. Lekunik Telepon/Faximile (0380) 8571005 Ba'a

**Website :** [www.rotendaokab.go.id](http://www.rotendaokab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN ROTE NDAO  
NOMOR :570/03.2/DPMPTSP/2023**

**TENTANG**

**TIM PELAKSANA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (LKIP) DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN ROTE NDAO  
TAHUN ANGGARAN 2022**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022, perlu membentuk Tim Pelaksana Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131-531-8801 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Tahun 2022 dengan susunan kepanitiaan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:

1. PENANGGUNG JAWAB

Bertanggung jawab dalam Penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ndao Tahun 2022.

2. KETUA

Melakukan koordinasi dengan penanggung jawab dalam rangka kelancaran pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022;

### 3. SEKRETARIS

- a. Mengkoordinasikan secara langsung Anggota dan Staf Sekretariat; dan
- b. Bertanggung jawab terhadap semua tahapan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 secara administratif.

### 4. ANGGOTA

Menjalin koordinasi antar anggota Tim dan sekretaris serta menghimpun data dan mengolahnya dalam rangka Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022;

KETIGA : Tim Pelaksana Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini, bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ba'a  
Pada tanggal, 10 Januari 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Rote Ndao,



**Daud D. Bessie, S.Pd**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690811 199801 1 002

Tembusan :

1. Bupati Rote Ndao di Ba'a;
2. Wakil Bupati Rote Ndao di Ba'a;
3. Inspektur Kabupaten Rote Ndao di Ba'a;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao di Ba'a;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Rote Ndao di Ba'a; dan
6. Tim pelaksana masing-masing di tempat.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROTE NDAO**

**NOMOR : 570/02.2/DPMPTSP/2023**

**TANGGAL : 10 JANUARI 2023**

**TENTANG : TIM PELAKSANA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2022**

SUSUNAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2022

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Daud D. Bessie, S.Pd	Penanggung Jawab
2.	Erna P. Aked, BA	Ketua
3.	Sarina Saudale, SE	Sekretaris
4.	Jusuf A.M. Sanu, ST	Anggota
5.	Paulus Balukh, SE	Anggota
6.	Yulensi Amalo, SH	Anggota
7.	Soni Anin, SE	Anggota
8.	Husain Mitan, S.Sos	Anggota
9.	Theresia A. Meko, S.STP	Anggota

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Rote Ndao,



**Daud D. Bessie, S.Pd**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690811 199801 1 002